

PERSEPSI WARTAWAN KRIMINAL DAN HUKUM DI
MAKASSAR TERHADAP PASAL 5 KEWI (KODE ETIK
WARTAWAN INDONESIA)



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar

Sarjana Sosial (S.sos) Jurusan Jurnalistik

Pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Oleh:

YULIANTI

Nim : 50500110027

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2014

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yulianti
NIM : 50500110027
Tempat/Tgl. Lahir : Dompu, 19 Juni 1991
Jur/Prodi/Konsentrasi : Jurnalistik
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Alamat : Jln. Manuruki raya No.14
Judul : Persepsi Wartawan Kriminal dan Hukum di Makassar terhadap Pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar dan hasil karya sendiri. jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar ,

Penyusun,

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Salawat dan salam juga penulis kirimkan kepada Nabiullah dan Rasulullah Muhammad SAW yang telah membimbing para pengikutnya kepada keselamatan dunia dan akhirat.

Penulis mendapat banyak bimbingan dan arahan dari berbagai pihak dalam proses penyelesaian skripsi. Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada Bapak Dr.Misbahuddin M.Ag selaku pembimbing utama dan Ibu Andi Fauziah Astrid, S.Sos., M.Si, selaku pembimbing kedua yang selalu memberikan arahan dengan penuh kesabaran dalam proses pembimbingan skripsi. Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. A. Qadir Gassing Ht. M.S selaku Rektor Universitas Islam Negeri Makassar.
2. Ibu Dr.Hj. Muliaty Amin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Makassar.
3. Bapak Dr.Nurhidayat M. Said, M.Ag, selaku wakil Dekan I Fakultas dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Makassar.
4. Bapak Drs. Muh. Anwar, M.Hum, selaku wakil Dekan II Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Makassar.
5. Bapak Dr. H.Usman Jasad, S.Ag. M.Pd, selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Makassar.

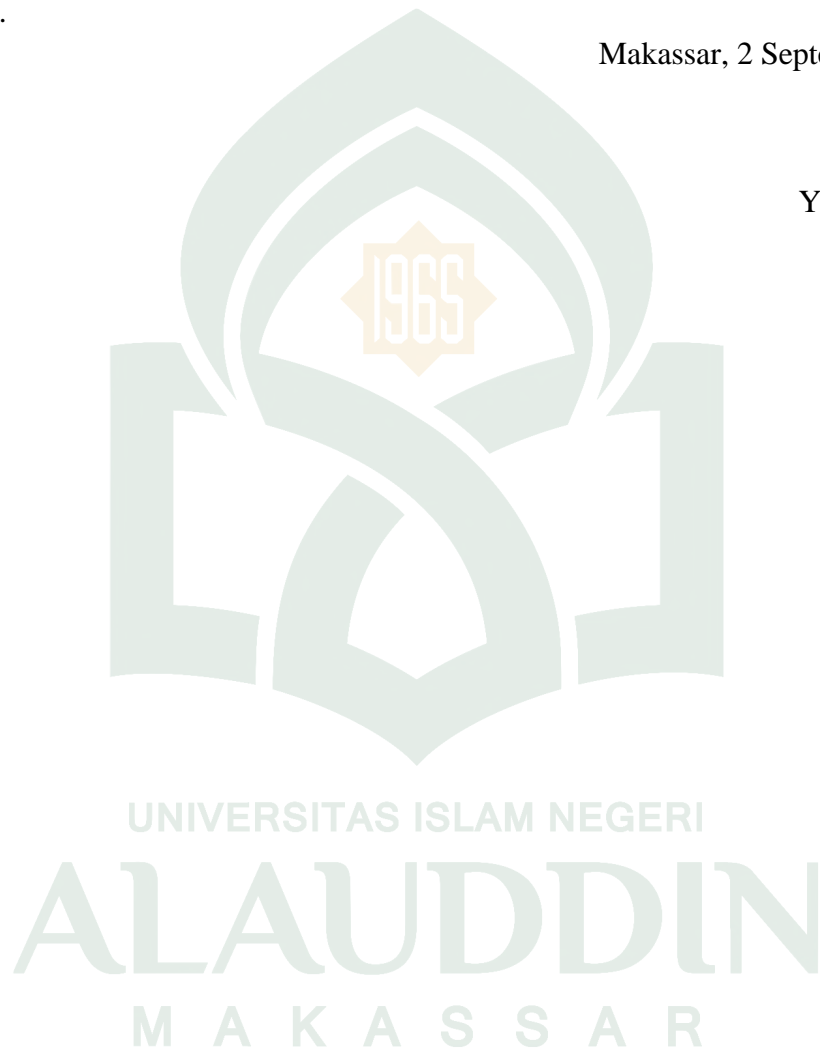
6. Bapak Dr. Firdaus Muhamamad, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Makassar.
7. Bapak Drs. Alamsyah, M.Hum., selaku Sekertaris Jurusan Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Makassar.
8. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Makassar yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama kuliah.
9. Seluruh Staf Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Makassar.
10. Kepada kedua orang tua penulis (H. Sa'ban dan Hj. St Khadijah) kakak dan adik penulis (Fitri dan Nita) yang selalu mendukung penuh selama penyelesaian.
11. Wartawan peliput berita kriminal dan hukum Makassar yang telah membantu penulis selama penelitian. (Ibnu, Sarah, kak Nilam, kak ahmad dll.)
12. Teman-teman seperjuangan angkata 2010 , Anggi, Rani, Chia, Himra, Rahma, Putri, Tri, Sarah, Imran, Satria, Ikhwan, Ibnu, Lin dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-satu.
13. Teman-teman KKN angkatan 49 Desa Kanjilo. Kec. Barombong. Kab. Gowa. Eda, Ifa, Tiwi, Dian, Tety, Nashri, Umar, Rifda dan Muchlis. Yang selalu saling memberikan spirit dan motivasi.
14. Saudara-saudara saya yang di Pondok Alief. Mila, Lina, Asnur, kak Ayu, Wiwi, Rahmi, Enda, Ikha, Sri dan Isna. Yang selalu memberikan motivasi.

Penulis menyadari bahwa tidak ada karya manusia yang sempurna sehingga kritikkan dan saran dibutuhkan untuk pengembangan karya tulis ke depan. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri.

Wassalam.

Makassar, 2 September 2014

Yulianti



DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GRAFIK	ix
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1-9
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	9
C. DEFINISI OPRESIONAL	10
D. KAJIAN PUSTAKA	13
E. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	15
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	17-42
A. PERS DAN JURNALISTIK	17
B. WARTAWAN	21
C. KODE ETIK WARTAWAN INDONESIA.....	24
D. PASAL 5 KEWI (KODE ETIK WARTAWAN INDONESIA).....	26
E. PERSEPSI.....	27
F. PROSES PEMBENTUKAN PERSEPSI.....	29
G. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERBEDAAN PERSEPSI.....	31
H. TEORI DISONANSI KOGNITIF.....	33
I. ASUMSI DASAR TEORI DISONANSI KOGNITIF.....	36
J. DISONANSI KOGNITIF DAN PERSEPSI.....	39
K. KERANGKA PIKIR.....	41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	43-47
A. JENIS DAN LOKASI PENELITIAN.....	43
B. PENDEKATAN PENELITIAN.....	43

C. POPULASI DAN SAMPEL.....	44
D. METODE PENGUMPULAN DATA.....	44
E. INSTRUMEN PENELITIAN.....	45
F. VALIDASI DAN REALIBILITASI INSTRUMEN.....	46
G. ANALISIS DATA.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48-75
A. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	48
B. HASIL PENELITIAN.....	49-63
C. PEMBAHASAN.....	63-75
BAB V PENUTUP.....	76-77
A. KESIMPULAN.....	76
B. SARAN.....	77

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Proses Terbentuknya Persepsi	31
Tabel 2 Proses Disonansi Kognitif (West and Turner)	35
Tabel 3 Kerangka Pikir	42
Tabel 4 Pernyataan 1	49
Tabel 5 Pernyataan 2	50
Tabel 6 Pernyataan 3	50
Tabel 7 Pernyataan 4	51
Tabel 8 Pernyataan 5	52
Tabel 9 Akumulasi Indikator Pengetahuan	52
Tabel 10 pernyataan 6	53
Tabel 11 Pernyataan 7	54
Tabel 12 Pernyataan 8.....	55
Tabel 13 Pernyataan 9.....	55
Tabel 14 Pernyataan 10	56
Tabel 15 Pernyataan 11	57
Tabel 16 Pernyataan 12	57
Tabel 17 Pernyataan 13	58
Tabel 18 Pernyataan 14	59
Tabel 19 Akumulasi Indikator Sikap	59
Tabel 20 Pernyataan 15	60
Tabel 21 Pernyataan 16	60
Tabel 22 Pernyataan 17.....	61
Tabel 23 Akumulasi Indikator Perilaku	62

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik Pernyataan 1	lampiran
Grafik Pernyataan 2	lampiran
Grafik Pernyataan 3	lampiran
Grafik Pernyataan 4	lampiran
Grafik Pernyataan 5	lampiran
Grafik Pernyataan 6	lampiran
Grafik Pernyataan 7	lampiran
Grafik Pernyataan 8	lampiran
Grafik Pernyataan 9	lampiran
Grafik Pernyataan 10	lampiran
Grafik Pernyataan 11	lampiran
Grafik Pernyataan 12	lampiran
Grafik Pernyataan 13	lampiran
Grafik Pernyataan 14	lampiran
Grafik Pernyataan 15	lampiran
Grafik Pernyataan 16	lampiran
Grafik Pernyataan 17	lampiran

ABSTRAK

Nama : Yulianti

NIM : 5000110027

**Judul : PERSEPSI WARTAWAN KRIMINAL DAN HUKUM DI
MAKASSAR TERHADAP PASAL 5 KEWI (KODE ETIK
WARTAWAN INDONESIA)**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi wartawan peliput berita kriminal dan hukum di Makassar terhadap Pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia).

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengetahuan wartawan kriminal dan hukum di Makassar terhadap Pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia). . Penelitian ini menjelaskan pengetahuan, sikap dan perilaku wartawan terhadap Pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia). Teori yang digunakan ialah teori disonansi kognitif dari Leon Festinger. Inti dari teori ini adalah adanya ketidaksesuaian antara kognisi sebagai aspek sikap dengan perilaku yang terjadi pada diri seseorang. Teori ini memungkinkan dua elemen untuk memiliki tiga hubungan yang berbeda satu sama lain, yakni konsonan, disonan dan tidak relevan.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang hanya menggambarkan situasi, peristiwa atau fenomena yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey, yaitu terhadap 30 wartawan yang mempunyai job deks kriminal dan hukum di Makassar, yang menggunakan teknik sampel *purposive*. Proses pengumpulan datanya menggunakan kuesioner (angket). Untuk pengolahan data, peneliti menggunakan aplikasi SPSS 16 dengan submenu *frequencies*.

Hasil penelitian ini menjelaskan persepsi wartawan kriminal dan hukum di Makassar terhadap Pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia) . yaitu pada

pengetahuan (82,2%), selanjutnya adalah sikap (80,4%) yang setuju dan sepakat terhadap pasal 5 KEWI yang mengatur wartawan. Selanjutnya adalah perilaku (77,7%) yaitu sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Pasal 5 KEWI.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebebasan pers merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan pers itu sendiri. kendati pers dan wartawan diberikan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang Pers No.40 Tahun 1999, tetap memiliki rasa tanggung jawab terhadap masyarakat mengenai kegiatannya.

Jadi kebebasan pers penting dalam kehidupan pers. Tetapi, kebebasan pers akan lebih bermakna jika disertai dengan tanggung jawab. Dengan kata lain pers tidak sewenang-wenang/sebebas-bebasnya. Wartawan tidak boleh menyalahgunakan kebebasan untuk motif pribadi atau tujuan yang tak berdasar. Allah SWT dalam Al-Qu'ran surat Al-Hujarat: 6, agar setiap orang perlu berhati-hati dalam memberikan informasi supaya tidak merugikan orang lain atau pihak lain.

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak, menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu (Al-Hujarat:6)”¹.

Pers atau media massa dalam kegiatannya memiliki wartawan-wartawan yang kewajibannya untuk mencari, mengolah hingga mempublikasikan berita atau informasi kepada masyarakat. wartawan di sini merupakan seorang pelaku dalam

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan, Juz 49* (Jakarta: Intermasa, 1993), h.

kegiatan jurnalistik, yang dalam pekerjaannya dilindungi oleh Undang-undang No.40 tentang pers.²

Effendi memberikan definisi wartawan :

“Wartawan adalah komunikator yang terlembaga (*institutionalized communication*) yang dibelenggu oleh berbagai restriksi, yang membatasi ruang gerakannya. Ia dibelenggu oleh Kode Etik Jurnalistik, undang-undang pers, KUHP, *policy* surat kabar, dan lain-lain. Sehingga apabila ia melakukan kegiatan jurnalistiknya apakah itu mengolah berita, membuat tajuk rencana, membuat pojok, atau menyusun reportase, restriksi-restriksi tersebut tidak bisa tidak ia harus diperhitungkan.”³

Di pihak lain, wartawan secara pribadi juga dibebankan berbagai tanggung jawab oleh perusahaan media yang mempekerjakan mereka, seperti tugas meliput berita berdasarkan penugasan yang kemudian hasil kerja akan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, pemerintah, redaksi, dan pemilik media.

Louis W. Hodges dalam Ishwara menyatakan:

“bahwa tanggung jawab wartawan berdasarkan *contracted responsibilities*, tanggung jawab ini berdasarkan perjanjian langsung dengan masyarakat. tanggung jawab ini bukanlah suatu kontrak formal atau tertulis, tetapi kenyataannya hal ini tidak menjadikannya kurang *real*. Masyarakat tampaknya menjanjikan kepada pers sebuah kebebasan untuk melaksanakan tugasnya dengan asumsi bahwa pers akan melayani kebutuhan masyarakat akan informasi dan opini”.⁴

Terkait dengan tanggung jawab berdasarkan kontrak dan tanggung jawab yang muncul, pers itu bersifat bebas dan bertanggung jawab kepada masyarakat untuk menyampaikan berita-berita yang akurat, menginformasikan kinerja pemerintah, tidak masuk ke ranah pribadi atau memojokkan seseorang dengan pemberitaannya maupun

² Resgana Fitrakumara, *Persepsi Wartawan Hukum dan Kriminal Tentang Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 KEWI* (Serang, 2010). h. 17

³ Onong Uchjana Effendi, *ilmu, teori dan filsafat komunikasi* (Bandung : Citra aditya Bakti , 2007), h. 122

⁴ Luwi Ishwara, *jurnalisme dasar* (Jakarta : kompas media nusantara, 2011), h. 30

penyebutan identitas dalam kejahatan susila. Untuk itu, untuk menjalankan profesi kewartawannya, seorang wartawan diatur oleh negara dalam Undang-undang pers Nomor. 40 tahun 1999.⁵

Mengingat masyarakat yang bersifat majemuk tata nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat selalu berbeda. Untuk itu pers dituntut sebanyak mungkin mengenali dan memahami tata nilai kemasyarakatan. Paling tidak, dapat diterima dengan baik dan bahkan dipercaya.⁶

Shaffat dalam bukunya *Kebebasan Bertanggung Jawab dan Penyimpangan Pers* mengatakan:

“Para wartawan mengerahkan segala sumber daya mereka untuk melaporkan sebuah peristiwa dan pernyataan yang mengandung kepentingan umum (memiliki nilai sosial). Hal ini menjadi kriteria utama untuk mereka sebelum meliput sebuah peristiwa atau pernyataan jika peristiwa atau pernyataan tidak memiliki nilai sosial, seyogyanya wartawan tidak memberitakannya”.⁷

Ada hakikatnya, manusia sebagai makhluk sosial dalam menjalankan kehidupannya, tentu memiliki peraturan yang membatasi sampai mana manusia tersebut melangkah. Begitu juga halnya profesi sebagai wartawan. Dalam menjalankan tugasnya, wartawan memiliki kode etik yang dinamakan kode etik jurnalistik. Dalam kode etik jurnalistik tersebut wartawan diatur dan dijamin dalam menjalankan profesi kewartawannya.

⁵ Resgana Fitrakumara, *Persepsi Wartawan Hukum dan Kriminal Tentang Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 KEWI* . h. 18

⁶ Totok Djuroto, *manajemen penerbitan pers* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004), h. 8

⁷ Idris Saffat, *Kebebasan bertanggung jawab dan penyimpangan pers* (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2008), h. 21

Sebagai pedoman, dan tuntutan profesi, kode etik jurnalistik tidak hanya sebagai nilai-nilai yang ideal saja, tetapi terkait langsung dengan praktek jurnalistik. tokoh pers Indonesia, Muchtar Lubis, mengingatkan pers sebaiknya punya etika yang benar-benar operasional dalam diri wartawan. Dengan kata lain, ketidakpahaman dan ketidaktaatan terhadap kode etik jurnalistik adalah bagaikan kapas yang kehilangan arah sehingga, tidak jelas arah dan tujuannya⁸

Untuk itulah dalam perkembangannya, jurnalisme mengembangkan persyaratan yang perlu ditambahkan (di kode etik-an wartawan) dalam membuat berita. Hal ini terkait fenomena kekerasan yang terjadi di belahan dunia.

Pers dalam hal ini media, sudah sepatutnya memiliki fungsi mendidik kepada masyarakat baik yang menyangkut pendidikan informal yang mencoba meneruskan atau mewariskan suatu ilmu pengetahuan nilai sosial, etika, dan norma karena apa yang dihasilkan masyarakat, maka masyarakat akan mengonsumsi produk dari media tersebut.⁹

Wartawan juga sebagai pelaku jurnalistik sudah seharusnya menginformasikan berita yang benar dan tidak lupa mempertimbangkan pemberitaannya agar memiliki unsur mendidik kepada masyarakat. Apalagi wartawan beserta kegiatannya telah diatur di Undang-undang Pers Nomor. 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik yaitu mencari, mengolah, hingga mempublikasikan berita atau

⁸ _____, *Representasi Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam Surat Kabar (Analisis isi Tentang Pelanggaran terhadap Pasal 4 dan 5 Kode Etik Jurnalistik pada Berita Kriminal dalam rubric Wanted Surat Kabar Rakyat Merdeka Edisi Januari 2008.*(_____, 2008). h. 1

⁹ Nurudin, *pengantar komunikasi massa* (Ed. 1-4, Jakarta : Rajawali press, 2011), h. 86

informasi kepada masyarakat. jurnalis perlu mempertimbangkan (sebelum melakukan peliputan) apakah isu sensitif tersebut tidak bertolak belakang dengan etika.¹⁰

Stephen L. Vaughn mengemukakan bahwa¹¹ :

“Putlizer and Hearst are often adduced as the cause of the united stated’ entry into the Spanish-american war due to sensanolistist stories or exaggeration of the terrible conditions in cuba. Putlizer dan Hearst dianggap sebagai penyebab AS memasuki perang Spanyol–Amerika sejalan dengan berita sensasional atau berlebihan tentang kondisi di Kuba. Dari hal tersebut kita dapat melihat betapa besarnya pengaruh yang ditimbulkan dari pemberitaan surat kabar sehingga memicu terjadinya berita besar yang juga membawa korban. Apa yang ditampilkan mereka dapat menciptakan peristiwa tersebut adalah karena mampu menciptakan opini masyarakat AS pada saat itu”

Luwi Ishwara menyatakan bahwa:

“Kewajiban yang diemban wartawan melahirkan tanggung jawab yang harus mereka pikul. Akar dari tanggung jawab ini terutama berasal dari kenyataan bahwa kita ini selain sebagai individu juga menjadi anggota masyarakat, yang dengan keputusan dan tindakan kita, dapat mempengaruhi orang lain. Semakin besar kekuasaan atau kemampuan kita mempengaruhi orang lain, semakin berat pula kewajiban moral kita”.¹²

Penelitian ini yaitu mengkaji tentang penerapan pasal 5 kode etik jurnalistik

KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia) yang telah disahkan dewan pers 14 maret 2006. Pasal 5 tersebut berbunyi “wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan” penjelasan pertama dari pasal tersebut identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. Kemudian penjelasan kedua dari pasal tersebut bahwa anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 16 tahun yang belum menikah.

¹⁰ Resgana Fitrakumara, *Persepsi Wartawan Hukum dan Kriminal Tentang Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 KEWI* . h. 19

¹¹ Luwi Ishwara, *jurnalisme dasar* . h. 34

¹² Luwi Ishwara, *jurnalisme dasar* . h. 28

Dari media yang peneliti amati sebelum melakukan penelitian, terdapat media yang pemberitaannya tidak sesuai atau bertolak belakang dengan apa yang diamanatkan Pasal 5 Kode Etik Wartawan Indonesia. Pada poin pertama bahwa “wartawan indonesia tidak menyebut dan menyiarkan korban kejahatan asusila”.

Pertama peneliti menemukan dalam pemberitaan dari Tribun Timur.com. Edisi sabtu 1 Desember 2012, yang memberitakan kasus tersebut dengan judul *Malangnya.....Balita Tewas Ditendang Ibu Tiri*. “Nurlena Amanda (26) telah menganiaya anak tirinya Aini Junistisia (4) alias Junis. Tendangannya membuat sang bocah tewas di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, Jakarta Selatan, Kamis (29/11/2012).

Yang kedua peneliti menemukan pula kasus yang sama dari Harian Fajar, Edisi 21 Maret 2014 dengan Judul *Remaja Tewas Diduga Dikeroyok* “ Sesosok mayat laki-laki ditemukan bersimbah darah di Desa Salumanurung, Kecamatan Budongbudong, Kabupaten Mamuju Tengah, Sabtu 22 Maret, sekitar Pukul 21.30 Wita. Mayat tersebut diduga korban pengeroyokan. Kepala Kepolisian Resor (Polres)Mamuju, AKBP Eko Wagiyanto, menjelaskan berdasarkan informasi, Korban di ketahui bernama Adi dan berumur 16 Tahun.

Satu poin lagi dari Kode etik Jurnalistik Pasal 5 KEWI, bahwa *Wartawan Indonesia tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan*. Dalam

poin ini juga, peneliti menemukan pemberitaan yang bertentangan dengan penjelasan Pasal 5 di atas.

Peneliti menemukan dari hasil observasi sebelum penelitian yaitu pemberitaan dari Harian Berita Kota Makassar edisi Rabu, 23 April 2014 dengan Judul *Lima ABG Terjaring Razia Geng Motor*. “ Lima Anak Baru Gede (ABG) terjaring razia geng motor yng dilancarkan Petugas Polsek Wajo di Jalan Cakalang. Kelima Pria ini diamankan karena tertangkap tangan sedang menghisap lem Fox di emperan ruko. Mereka diamankan masing-masing Zulfikar (13) Warga Jalan Kapoposan, Ziddan (12) Warga Jalan Kande, Sudi (12) dan Hendra (17) Warga jalan Cakalang dan Riky (13) Warga Jalan Satonda. Kelima ABG ini digiring ke Polsek Wajo bersama barang bukti kaleng lem fox untuk menjalani pemeriksaan.

Dari media tersebut, terdapat kecenderungan melanggar apa yang diamanatkan oleh pasal 5 KEWI , Pada pemberitaan di atas, media tersebut menyebutkan identitas para korban asusila dan pelaku kejahatan di bawah umur. Padahal wartawan dan media dalam pemberitaannya telah diatur dalam Kode Etik Jurnalistik. Wartawan dan media sebagai komunikator, walaupun memiliki fungsi informasi, namun mempertimbangkan nama baik dari korban dan pelaku tersebut.

Padahal, wartawan seharusnya menyembunyikan nama-nama wanita yang menjadi korban perkosaan atau anak-anak yang di aniaya secara seksual. Tujuannya untuk melindungi korban dari pencemaran namanya atau tercoreng aib. Tetapi dalam

hal larangan menyebut nama dan identitas pelaku kejahatan yang masih dibawah umur, dasarnya semata-mata pertimbangan kemanusiaan berdasarkan nasib serta hari esok korban beserta keluarganya.¹³

Dari semua fenomena di atas, bila berpatokan dengan kode etik jurnalistik Pasal 5, tentu saja bertolak belakang. Media maupun wartawan sebagai peliput peristiwa, sudah sepatutnya menaati kode etik jurnalistik tersebut. Ada banyak kepentingan yang melingkupi kerja jurnalis, entah pemilik modal, pemerintah, narasumber, pemasang iklan, dan lain-lain.

Dalam kasus ini, tentunya tidak lepas dari peran seorang wartawan sebagai peliput, yang dalam peliputannya mendapatkan data dan identitas mengenai kasus-kasus tersebut. Sehingga sepatutnya wartawan dituntut untuk menaati kode etik jurnalistik.

Pada hakikatnya, cara orang memandang, menafsirkan dan memberikan persepsi terhadap sesuatu berbeda-beda. Begitu pula dengan profesi sebagai wartawan. Cara wartawan menilai dan memandang kode etik jurnalistik pada Pasal 5 juga dimungkinkan berbeda-beda. Entah itu disebabkan perbedaan latar belakang pendidikan, pengalaman, kebiasaan, kepentingan maupun budaya yang telah melekat. penelitian ini bermaksud mengetahui persepsi wartawan kriminal dan hukum di Makassar terhadap Pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia).

¹³ Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori dan Praktek* (Bandung: Rosdakarya, 2005) h.119-120

Persepsi adalah pengalaman, tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah pemberi makna pada sensasi, sehingga manusia memperoleh pengetahuan baru.¹⁴

Berdasarkan fenomena yang dijelaskan di atas, persepsi wartawan terhadap Pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia). bisa saja berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, mengenai penyebutan identitas dalam peristiwa oleh pemberitaan. Karena wartawan merupakan ujung tombak dalam memperoleh berita.

Maka berangkat dari permasalahan dan fenomena yang telah dijelaskan di atas penulis akan menjadikannya sebagai penelitian yang berjudul “ Persepsi Wartawan kriminal dan hukum di Makassar terhadap Pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia) ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengetahuan wartawan kriminal dan hukum di Makassar terhadap pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia)?
2. Bagaimana sikap wartawan kriminal dan hukum di Makassar terhadap pasal 5 KEWI (Kode Etik Jurnalistik Indonesia)?

¹⁴ Jalaludin Rakhmat, Psikologi Komunikasi Suatu Pengantar (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004) h 49-51

3. Bagaimana perilaku wartawan kriminal dan hukum di Makassar terhadap pasal 5 KEWI (Kode Etik Jurnalistik Indonesia)?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup penelitian

1. Definisi Operasional

Untuk menghindari salah pengertian dalam penelitian ini, maka saya perlu menjelaskan beberapa variabel yang terdapat dalam penelitian ini, skripsi ini berjudul “ persepsi wartawan kriminal dan hukum di terhadap pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indoensia)”. dari judul tersebut terdapat dua variabel pertama adalah persepsi wartawan dan variabel kedua adalah penerapan kode etik jurnalistik pasal 5 KEWI.

Oleh karena itu penulis mencoba menjelaskan beberapa kata yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Persepsi

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan – hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.¹⁵

Persepsi adalah inti komunikasi, sedangkan penafsiran (interpretasi) adalah inti persepsi, yang identik dengan penyandian (*Decoding*) dalam proses komunikasi, persepsi disebut inti komunikasi, karena jika persepsi kita tidak akurat, tidak mungkin

¹⁵ Jalaludin Rahkmat, *Psikologi Komunikasi Suatu Pengantar* (Bandung,: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 51

kita berkomunikasi dengan efektif .¹⁶ Persepsilah yang menentukan kita memilih satu pesan dan mengabaikan pesan lain.

Menurut Salomon dalam Sutisna persepsi adalah proses bagaimana stimuli-stimuli diseleksi, diorganisasi, dan diinterpretasikan. Proses pembentukan persepsi berawal dari adanya stimuli yang ditangkap oleh alat indra (sensasi) yang kemudian diberikan arti kepadanya, atau juga bisa stimuli ditangkap oleh alat indra yang kemudian mendapatkan perhatian dan kemudian diinterpretasikan dan diberi tanggapan sehingga terjadilah persepsi.¹⁷

Jadi persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi mengacu pada interpretasi hal-hal yang kita indera. Ketika kita membaca buku, mendengarkan iPod, dipijat orang, mencium parfum, atau mencicipi sushi, kita mengalami lebih dari sekedar stimuli sensorik. Kejadian sensorik tersebut diproses sesuai pengetahuan kita tentang dunia, sesuai budaya, pengharapan, bahkan disesuaikan dengan orang yang bersama kita saat itu.¹⁸

b. Wartawan

Wartawan (*journalist*) adalah orang-orang yang terlibat dalam pencarian, pengolahan dan penulisan berita atau opini yang dimuat di media massa. Mulai dari

¹⁶ Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi suatu Pengantar* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005), h. 165

¹⁷ Sutisna, *Perilaku Konsumen dan komunikasi Pemasaran* (bandung : Remaja Rosdakarya , 2001), h. 62

¹⁸ Robert L. Solso, *DKK, Psikologi Kognitif* (Ed. 8, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2008), h.

pemimpin redaksi hingga koresponden yang terhimpun dalam bagian redaksi.¹⁹ Menurut Undang-undang Pers No. 40 tahun 1999 (pasal 1 point 4). Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.

Wartawan atau reporter merupakan faktor yang terpenting dalam semua kegiatan pembuatan berita. Apakah dia bekerja di daerah ataupun meliput jalannya perkembangan dunia. Dia harus mengunjungi suatu peristiwa dan mencari informasi yang dapat dijadikan berita. Kadang-kadang caranya tidak lebih daripada Tanya jawab biasa saja; kadang-kadang ia berperan seperti intelijen, keras hati dan cerdik dalam penyelidikannya.²⁰

Wartawan entah yang bekerja di surat kabar, majalah, radio, televisi, maupun yang di internet beroperasi 365 hari setahun dan 24 jam sehari, seseorang tidak berhenti menjadi wartawan setelah pukul 5 sore seperti layaknya orang yang bekerja di kantor.²¹

c. **Pasal 5**

pasal 5 KEWI (kode etik wartawan Indonesia) yang telah disahkan dengan pers 14 maret 2006 oleh wartawan. Pasal 5 tersebut berbunyi “ *wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan* ” penjelasan pertama

¹⁹ Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik terapan* (Bandung : Batic Press, 2002), h. 6

²⁰ Kustadi Suhandang, *pengantar jurnalistik : Seputar Organisasi, Produk, dan Kode etik* (Bandung : Penerbit Nuansa, 2004), h. 55

²¹ Luwi Ishawara, *Jurnalisme Dasar* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2011), h. 27

dari pasal tersebut adalah Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini adalah wartawan kriminal dan hukum yang berada di Makassar yang mempunyai *job deks* di kriminal dan hukum..

D. Kajian Pustaka

Terdapat hasil penelitian sebelumnya yang mempunyai relevansi dengan kasus yang diteliti terkait Persepsi Wartawan kriminal dan hukum di Makassar terhadap Pasal 5 KEWI, yaitu:

1. Resgana Fitrakumara,²² tentang Persepsi Wartawan Hukum dan Kriminal dalam Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 KEWI. Yang menyimpulkan bahwa:

- a. Pengetahuan

Pada tahap pengetahuan yang telah melalui proses penginderaan, dapat disimpulkan wartawan peliput Polda Metro Jaya memiliki tingkat pengetahuan yang sangat tinggi terhadap Pasal 5 KEWI. Hal ini ditunjukkan oleh 86,6% responden yang berpengetahuan sangat tinggi terhadap Pasal 5 KEWI yang mengatur dalam tugas jurnalistik dan pengertian identitas yang terdapat dalam isi Pasal 5 KEWI.

²² Resgana Fitrakumara, *Persepsi Wartawan Hukum dan Kriminal Tentang Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 KEWI* (Serang, 2010). h. 130-131

b. Atensi (perhatian)

Pada tahap atensi (perhatian) dapat disimpulkan wartawan Polda Metro Jaya (70,2%) memiliki tingkat perhatian yang sangat tinggi terhadap Pasal 5 KEWI, seperti dalam penulisan berita, peliputan berita, proses peliputan, dan penyebutan identitas korban sasusila dan pelaku kejahatan oleh anak di bawah umur. Mayoritas wartawan peliput Polda Metro Jaya juga memberi perhatian tinggi terhadap kebijakan redaksi dan Pasal 5 KEWI sebagai Kode etik yang tepat dalam mengatur wartawan. Selain wartawan peliput Polda Metro Jaya juga memberikan perhatian tinggi terhadap korban asusila dan pelaku kejahatan oleh anak di bawah umur dengan melindungi identitasnya agar tidak dipublikasikan.

c. Interpretasi (penafsiran)

Pada tahap interpretasi dapat disimpulkan wartawan peliput Polda Metro Jaya memiliki tingkat penafsiran yang tinggi terhadap Pasal 5 KEWI. Hal ini ditunjukkan oleh 80,6% responden yang memberi penafsiran tinggi terhadap isi Pasal 5 KEWI yang melarang penyebutan dan penyiaran identitas terhadap Pasal 5 KEWI sebagai landasan moral yang tepat. Hal ini menandakan Pasal 5 KEWI menurut wartawan Polda Metro Jaya adalah sesuatu yang diperlukan dan layak sebagai Kode Etik.

Penelitian yang dilakukan di atas yakni menjelaskan tingkat pengetahuan, perhatian dan penafsiran wartawan hukum dan kriminal tentang penerapan Pasal 5.

Sedangkan calon peneliti akan melakukan Penelitian mengenai bagaimana Pengetahuan Wartawan kriminal dan hukum di Makassar terhadap Pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia), bagaimana sikap wartawan kriminal dan hukum di Makassar terhadap Pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia), dan bagaimana perilaku wartawan kriminal dan hukum di Makassar terhadap Pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia). Penelitian ini menggunakan teori disonansi kognitif dari Leon Festinger. Teori ini menjelaskan adanya ketidaksesuaian antara kognisi sebagai aspek sikap dengan perilaku yang terjadi pada seseorang. Teori ini menggunakan elemen untuk memiliki tiga hubungan yang berbeda satu sama lain, yakni konsonan, disonan, dan tidak relevan.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk menjelaskan pengetahuan wartawan kriminal dan hukum di Makassar terhadap pasal 5 KEWI (kode etik wartawan Indonesia).
- b. Untuk mengetahui sikap wartawan kriminal dan hukum di Makassar terhadap pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia).
- c. Untuk mengetahui perilaku wartawan kriminal dan hukum di Makassar terhadap pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia).

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk referensi dalam pengembangan mata kuliah Jurnalistik, khususnya mengenai kode etik profesi jurnalistik.

- b. Untuk memberi masukan kepada para wartawan dalam menjalankan tugasnya di bidang jurnalistik, khususnya dalam menulis berita yang menyangkut identitas korban dan pelaku kejahatan.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

1. Pers dan Jurnalistik

Pers mempunyai dua pengertian, yakni pers dalam arti sempit dan pers dalam arti sempit dan pers dalam arti luas. pers dalam arti sempit ialah media massa cetak seperti surat kabar, majalah, tabloid dan sebagainya. Sedangkan pers dalam arti luas ialah meliputi media massa, cetak, elektronik, antara lain radio siaran, televisi siaran dan sebagai media yang menyiarkan karya jurnalistik.²³

Adapun istilah *ers* itu sendiri berasal dari istilah asing, yaitu *press* yang artinya menekan. Menekan disini identik dengan percetakan yang merupakan proses dari terbitnya sebuah surat kabar.

Media massa atau pers merupakan istilah yang digunakan pada tahun 1902-an untuk memperkenalkan jenis media yang secara khusus dirancang untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Menurut Oemar Seno Adji, bahwa pers dalam arti sempit yaitu penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan, atau berita-berita dengan kata tertulis. Sedangkan pers dalam arti luas yaitu memasukkan di dalamnya semua *media mass communication* yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang secara baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan lisan.²⁴

²³ Onong Uchjana Effendy, Ilmu, Teori dan filsafat Komunikasi (Bandung: Citra Aditya karya, 2007) h. 90

²⁴ Apriadi Tamburaka: *Literasi Media cerdas bermedia khalayak media massa* (Jakarta: Rajawali pers, 2013), h. 39

Pers adalah sarana yang menyiarkan produk jurnalistik. Pada zaman sekarang ini, jurnalistik tidak hanya mengolah berita, tetapi aspek-aspek lain untuk surat kabar. Untuk itu fungsi-fungsi bukan lagi menyiarkan berita atau informasi. Tetapi juga mendidik, menghibur dan mempengaruhi khalayak agar melakukan kegiatan tersebut.

Sementara itu menurut Alexis S. Tan fungsi komunikasi bisa beroperasi dalam empat hal. Meskipun secara eksplisit ia tidak mengatakan fungsi komunikasi massa, tetapi ketika ia menyebut bahwa penerima pesan dalam komunikasi bisa kumpulan orang (*a group of person*) atau ia menyebutnya *mass audience*, sedangkan pengirim pesan atau komunikatornya termasuk kelompok orang atau media massa, itu sudah dapat dijadikan bukti bahwa fungsi yang dimaksud adalah fungsi komunikasi massa. Paling tidak, itu bisa dilihat dari ciri komunikator dan *Audience*-nya.

Sementara itu menurut Kusumaningrat, Pers memiliki beberapa fungsi , diantaranya²⁵

1) Fungsi Informatif

Yaitu memberikan informasi atau berita, kepada khalayak ramai dengan cara yang teratur. Pers menghimpun berita yang dianggap berguna dan penting bagi banyak orang dan kemudian menuliskannya dengan kata-kata.

2) Fungsi Kontrol

²⁵ Hikmat Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori dan Praktek*. (Bandung: Rosdakarya, 2005), h. 27

Pers yang bertanggung jawab adalah masuk ke balik panggung kejadian untuk menyelidiki pekerjaan pemerintah atau perusahaan. Pers harus memberitakan apa yang berjalan baik dan tidak berjalan baik. fungsi *watch-dog* harus dilakukan dengan lebih aktif oleh pers dari pada oleh kelompok masyarakat lainnya. Kita sering mendengar peran Watchdog yang katanya “ membantu yang menderita dan membuat yang mapan menderita”²⁶

3) Fungsi interpretatif dan direktif

Yaitu memberikan interpretasi dan bimbingan. Pers harus menceritakan kepada suatu masyarakat tentang arti suatu kejadian/peristiwa. Ini biasanya dilakukan pers melalui tajuk rencana atau tulisan-tulisan latar belakang.

4) Fungsi Menghibur

Para wartawan menuturkan kisah-kisah dunia dengan hidup dan menarik. Mereka menyajikan humor dan drama serta music. Mereka menceritakan kisah yang lucu untuk diketahui meskipun cerita itu tidak terlalu penting.

5) Fungsi Regeneratif

Yaitu menceritakan bagaimana sesuatu itu dilakukan dimasa lampau, bagaimana dunia ini dijalankan sampai sekarang, bagaimana sesuatu bisa diselesaikan, dan apa yang dianggap oleh dunia itu benar atau salah, pers membantu menyampaikan warisan sosial kepada generasi baru agar terjadi proses regenerasi dari angkatan yang sudah tua kepada angkatan yang lebih muda.

²⁶ Luwi Ishwara, *Jurnalisme Dasar* . (Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2011), h. 19

6) Fungsi pengawalan hak-hak warga negara

Yaitu mengawal dan mengamankan hak-hak pribadi. Pers yang bekerja berdasarkan teori tanggung jawab harus menjamin hak setiap pribadi untuk didengar atau diberi penerangan yang dibutuhkannya. Dalam beberapa hal rakyat hendaknya diberi kesempatan untuk menulis dalam media untuk melancarkan kritikan terhadap sesuatu yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat, bahkan kadang-kadang mengkritik medianya sendiri.

7) Fungsi Ekonomi

Yaitu melayani sistem ekonomi melalui iklan tanpa radio, televisi, majalah dan surat kabar, maka beratlah untuk mengembangkan perekonomian sepesat sekarang dengan menggunakan iklan, penawaran akan berjalan dari tangan ke tangan dan barang produksipun dapat dijual.

8) Fungsi Swadaya

Yaitu bahwa pers mempunyai kewajiban untuk memupuk kemampuannya sendiri agar ia dapat membebaskan dirinya dari pengaruh-pengaruh atau tekanan-tekanan dalam bidang keuangan. Karena itulah untuk menjaga kebebasannya yang murni, pers pun berkewajiban untuk memupuk kekuatan permodalannya sendiri.

Fungsi pers menurut Undang-Undang No. 40. Tahun 1999 sebagaimana dijelaskan pasal 3 ayat (1) dan (2) adalah pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, control social dan sebagai lembaga ekonomi.

2. Wartawan

Wartawan (*journalist*) adalah orang-orang yang terlibat dalam pencarian, pengolahan dan penulisan berita atau opini yang dimuat di media massa. Mulai dari pemimpin redaksi hingga koresponden yang terhimpun dalam bagian redaksi.²⁷ Menurut Undang-undang pers No. 40 tahun 1999 (pasal 1 point 4). Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.

Wartawan atau reporter merupakan faktor yang terpenting dalam semua kegiatan pembuatan berita. Apakah dia bekerja di daerah ataupun meliput jalannya perkembangan dunia. Dia harus mengunjungi suatu peristiwa dan mencari informasi yang dapat dijadikan berita. Kadang-kadang caranya tidak lebih daripada Tanya jawab biasa saja; kadang-kadang ia berperan seperti intelijen, keras hati dan cerdik dalam penyelidikannya.²⁸

Wartawan bukan sekedar pekerjaan, tetapi sebuah jalan hidup dimana orang dituntut untuk selalu mencari gagasan baru. Pemimpin redaksi *Salon.com*, ketika menanggapi buku *The Elements of Journalism* mengatakan bahwa jurnalisme merupakan panggilan masyarakat yang tinggi. Semua yang terlibat mempunyai kewajiban yang lebih besar kepada *Audiences* daripada kepada tuntutan pasar. Mereka seolah ditarik oleh suatu kekuatan dari luar diri mereka untuk menjadi khusus serta sekaligus mengemban kewajiban yang khusus pula.

²⁷ Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik terapan* (Bandung : Batic Press, 2002), h. 6

²⁸ Kustadi Suhandang, *pengantar jurnalistik : Seputar Organisasi, Produk, dan Kode etik* (Bandung : Penerbit Nuansa, 2004), h. 55

Kewajiban yang diemban wartawan melahirkan tanggung jawab yang harus mereka pikul. Akar dari tanggung jawab ini terutama berasal dari kenyataan bahwa kita ini selain sebagai individu juga menjadi anggota masyarakat, yang dengan keputusan dan tindakan kita, dapat mempengaruhi orang lain. Semakin besar kekuasaan atau kemampuan kita mempengaruhi orang lain, semakin besar pula kewajiban moral kita.²⁹

Wartawan memiliki tugas yang berat dalam menyampaikan beritanya, karena sebagai seorang wartawan, harus pula mempertimbangkan dampak-dampak yang mungkin terjadi dari berita yang dibuatnya. Sehingga walaupun wartawan memiliki kebebasan yang dijamin, namun tetap harus mempertimbangkan hal-hal yang menjadi konsekuensi dari pemberitaan. Kita mempunyai pers yang bebas dan bertanggung jawab (*free and responsibility*), tetapi kita tidak mungkin mempunyai pers yang bebas dan tanggung jawab dalam pengertian *Accountable*.³⁰

Wartawan adalah sebuah profesi, dengan kata lain wartawan adalah seorang professional sepertinya dokter, bidan, polisi, guru maupun pengacara. Pekerjaan ini disebut sebagai profesi jika memiliki empat hal sebagai berikut. Seperti yang dikemukakan sarjana india Dr. Lakshamana Rao yang dikutip oleh Ja'far Assegaf dalam buku *Jurnalistik Terapan* karya Asep Syamsul M. Romli :

- a. Harus terdapat kebebasan dalam pekerjaan tadi;
- b. Harus ada panggilan dan keterikatan dari pekerjaan itu;

²⁹ Luwi Ishwara, *Jurnalisme Dasar* (Jakarta: Kompas Media Nasional, 2011), h. 29

³⁰ Luwi Ishwara, *Jurnalisme Dasar* . h. 29

- c. Harus ada keahlian (expertise);
- d. Harus ada tanggung jawab yang terikat pada kode etik pekerjaan;

Bila dikaitkan dengan wartawan, tentu profesi wartawan telah memenuhi kriteria seperti di atas :

Pertama wartawan memiliki kebebasan yang disebut kebebasan pers, yakni kebebasan mencari, mengolah, dan menyebarluaskan dan gagasan dari informasi. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers menyebutkan, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, bahkan media nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran (pasal 4 ayat 1 dan 2). Pihak yang coba menghalangi kemerdekaan pers dapat dipidana penjara maksimal dua tahun atau denda maksimal Rp. 500 juta (pasal 18 ayat 1).

Kedua, jam kerja wartawan adalah 24 jam sehari. Karena peristiwa yang harus diliputnya sering tidak terduga dan bisa terjadi kapan saja. Sebagai seorang yang profesional, wartawan harus terjun ke lapangan meliputnya. Itulah panggilan dari keterikatan dengan bekerja sebagai wartawan. Bahkan wartawan harus bekerja dalam keadaan bahaya. Mereka menjadi orang pertama dalam mendapatkan berita.³¹

Michael Oreskes dari *New York Times* menulis dalam *American Journalism Review*, persaingan bukanlah hal yang baru bagi wartawan; demikian pula bekerja dengan kecepatan tinggi. Yang jelas, wartawan adalah seorang yang mampu menghasilkan tulisan yang dapat dipercaya dalam keadaan tekanan waktu. Dan memang, dia harus pandai bersikap tenang dalam menghadapi berbagai tekanan.

³¹ Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik terapan* (Bandung : Batic Press, 2002), h. 97

Batas waktu atau *deadline* bukan alasan untuk ketidaksempurnaan. Dalam peliputan batas waktu, *deadline reporting* ini, wartawan harus bisa menghasilkan berita dengan kecepatan kilat yang isinya seakan-akan tidak dibuat dengan terburu-buru. Hasilnya adalah suatu cerita yang kaya dengan detail dan suara dari lokasi kejadian yang bisa membuat para pembacanya berpikir, merasa, dan haru.³²

Ketiga, wartawan mempunyai/ memiliki keahlian mencari, meliput dan menulis berita, termasuk dalam keahlian berbahasa tulisan dan bahasa jurnalistik.

Keempat, wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik (pasal 7 ayat (2) UU No.40/1999 tentang pers). Dalam penjelasan disebutkan, yang dimaksud kode etik jurnalistik adalah kode etik yang disepakati oleh organisasi wartawan dan disahkan dewan pers.

Dalam menjalankan tugasnya, wartawan terikat dengan nilai dan moral yang berlaku dalam suatu masyarakat. wartawan dalam menjalankan tugasnya, harus memenuhi peraturan-peraturan yang menjunjung tinggi nilai moralitas. Salah satu peraturan itu adalah setiap wartawan harus memperlihatkan kemampuan profesional dalam setiap berita yang diliput atau ditulisnya..

3. Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI)

Berbagai organisasi kewartawanan mengadakan pertemuan di Jakarta, 14 Maret 2006 dan mengesahkan Kode Etik Jurnalistik baru yang menggantikan Kode Etik Jurnalistik Indonesia (KEWI) versi lama. Fasilitas yang difasilitasi dewan pers situ dihadiri 29 dari 35 organisasi pers yang diundang. Organisasi pers yang hadir

³² Luwi Ishwara, *Jurnalisme Dasar* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2011), h. 41

terdiri dari 27 organisasi wartawan dan 2 organisasi perusahaan pers. Selain mengesahkan Kode Etik Jurnalistik, para peserta juga menyepakati rumusan mengenai penguatan para dewan pers dan standar organisasi wartawan.³³

Kode Etik Jurnalistik akan menjadi standar organisasi wartawan, dan penguatan dewan pers yang telah ditanda tangani oleh organisasi-organisasi pers disahkan dewan pers melalui Surat Keputusan (SK). Kode etik yang baru ini terdiri 11 pasal, lebih banyak 4 pasal dari Kode etik sebelumnya. Menurut saffat kode etik ini dianggap lebih baik dari pada kode etik sebelumnya karena dapat menampung lebih lengkap persoalan- persoalan yang berkembang dalam media cetak maupun elektronik. sementara di kode etik lama (KEWI) persoalan media elektronik dianggap tidak cukup menampung.

Menurut Atmakusumah Astraatmadja dalam bukunya Idris Saffat Kebebasan Tanggung Jawab dan Penyimpangan Pers, setidaknya ada tiga hal mendorong wartawan menghormati keragaman. Pasal 8 mewanti-wanti wartawan untuk menjauhi prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas perbedaan suku, agama, ras, dan warna kulit.³⁴

Kedua, wartawan meminta memberikan perlindungan kepada pelaku kejahatan yang masih tergolong anak-anak. Identitasnya tidak boleh disebutkan secara jelas. Perlakuan serupa harus diberikan kepada korban kejahatan susila.

³³ Idris Saffat, *Kebebasan Tanggung Jawab dan Penyimpangan Pers* (Jakarta: Prestasi Pustaka: 2008) h. 64

³⁴ Idris Saffat, *Kebebasan Tanggung Jawab dan Penyimpangan Pers*. h. 65

Ketiga, yakni soal opini dalam penulisan berita. Pasal 3 dalam kode etik menyatakan “ Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara seimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.” Yang dilarang ialah opini menghakimi. Opini berdasarkan penafsiran atas fakta tetap diperbolehkan.

4. Pasal 5 Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI)

Dalam kamus bahasa Indonesia, penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan. Bunyi dari Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 adalah “*wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebut identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.*” Penjelasan pertama dari pasal tersebut adalah identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. Kemudian yang penjelasan yang kedua dari pasal tersebut bahwa anak adalah seorang yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah.

Dalam Pasal 5 ini, Kode Etik Jurnalistik memandang bahwa identitas yang berkaitan dengan pemberitaan harus memiliki pertimbangan dalam menyiarkan nama-nama yang terlibat dalam suatu kasus kriminal. Karena wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistik, khususnya yang berkaitan dengan kriminalitas, telah dibatasi oleh rambu-rambu Kode Etik Jurnalistik.

Dalam Pasal 5 ini dijelaskan bahwa wartawan tidak diperkenankan menyebutkan identitas korban susila dan anak yang di bawah umur yang menjadi pelaku kejahatan. Identitas di sini adalah semua data dan informasi yang menyangkut

diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak, seperti nama, keluarga, tempat tinggal dan umur yang bersangkutan.

Arti kata *susila* sendiri adalah sopan, beradab, baik budi bahasa. *Kesusilaan* artinya kesopanan, sopan, santun, keadaban. Jadi kejahatan terhadap kesusilaan artinya kejahatan terhadap keadaban, yaitu kejahatan terhadap kehalusan dan kebaikan budi pekerti atau tingkah laku.³⁵

Dalam hal Kode Etik Jurnalistik ini, wartawan sebagai pencari berita, harus memiliki pertimbangan rasa kemanusiaan dalam memberitakan kasus-kasus kesusilaan dan pelaku kejahatan oleh anak di bawah umur, terlebih lagi dengan serta melibatkan keluarga dalam peliputannya.

Media massa yang memiliki fungsi mendidik, mempunyai pengaruh sangat kuat terhadap apa yang diberitakan oleh media massa. Sehingga perlu adanya Kode Etik Jurnalistik sebagai rambu-rambunya.

Pers mempunyai pengaruh sangat besar. Pengaruh pemberitaan dapat menghasilkan semacam dominan efek yang dapat mempengaruhi dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan kejiwaan anak-anak.³⁶

5. Persepsi

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.³⁷

³⁵ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia* (Bandung : Penerbit Alumni, 1992),h. 10

³⁶ Wina Armada Sukardi, *Close Up Seperempat Abad Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik* (Jakarta: Dewan Pers, 2007), h.68

Persepsi adalah inti komunikasi, sedangkan penafsiran (interpretasi) adalah inti persepsi, yang identik dengan penyandian (*decoding*) dalam proses komunikasi, persepsi disebut inti komunikasi, karena jika persepsi kita tidak akurat, tidak mungkin kita berkomunikasi dengan efektif.³⁸ Persepsilah yang menentukan kita memilih satu pesan dan mengabaikan pesan lain.

Menurut Salomon dalam Sutisna persepsi adalah proses bagaimana stimuli-stimuli diseleksi, diorganisasi, dan diinterpretasikan. Proses pembentukan persepsi berawal dari adanya stimuli yang ditangkap oleh alat indra (sensasi) yang kemudian diberikan arti kepadanya, atau juga bisa stimuli ditangkap oleh alat indra yang kemudian mendapatkan perhatian dan kemudian diinterpretasikan dan diberi tanggapan sehingga terjadilah persepsi.³⁹

Jadi persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi mengacu pada interpretasi hal-hal yang kita indera. Ketika kita membaca buku, mendengarkan iPod, dipijat orang, mencium parfum, atau mencicipi sushi, kita mengalami lebih dari sekedar stimuli sensorik. Kejadian sensorik tersebut diproses sesuai pengetahuan kita tentang dunia, sesuai budaya, pengharapan, bahkan disesuaikan dengan orang yang bersama kita saat itu.⁴⁰

³⁷ Jalaludin Rahkmat, *Psikologi Komunikasi Suatu Pengantar* (Bandung,: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 51

³⁸ Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi suatu Pengantar* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005), h. 165

³⁹ Sutisna, *Perilaku Konsumen dan komunikasi Pemasaran* (bandung : Remaja Rosdakarya , 2001), h. 62

⁴⁰ Robert L. Solso, DKK, *Psikologi Kognitif* (Ed. 8, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2008), h. 75

6. Proses Pembentukan Persepsi

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa persepsi diawali oleh proses pengindaran suatu stimulus, yang kemudia stimulus tersebut diteruskan syaraf ke otak agar tebentuk persepsi. Persepsi tidak begitu saja lahir, tetapi telah melalui beberapa proses.

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Penginderaan adalah merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima yaitu alat indera. Namun proses tersebut tidak berhenti di situ saja, pada umumnya stimulus tersebut diteruskan oleh syaraf ke otak sebagai pusat susuna syaraf, dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi.⁴¹

Makna pesan yang dikirim ke otak harus dipelajari. Melalui penginderaan kita mengetahui dunia. Kita tidak dapat mengetahui apa yang ada di dunia ini tanpa adanya indera dan penginderaan. Kita dapat mempersepsi apa yang kita rasakan , baik indera penciuman, peraba, penglihatan dan lainnya.

Rakhmat Jalaudin dalam bukunya Psikologi Komunikasi, juga memberikan penjelasan-penjelasan tentang proses sensasi :

“Tahap paling awal dalam penerimaan informasi ialah sensasi. Sensasi berasal dari kata **sense** yang artinya alat pengideraan, yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Melalui alat inderalah manusia dapat memahami fisik lingkungannya. Melalui alat inderalah manusia memperoleh pengetahuan dan semua kemampuan untuk berinteraksi dengan duniannya”.⁴²

⁴¹ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah* (Yogyakarta: Yayasan Fakultas Psikologi UGM, 2002), h. 45

⁴² Jalaludin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi Suatu Pengantar* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004), h. 24

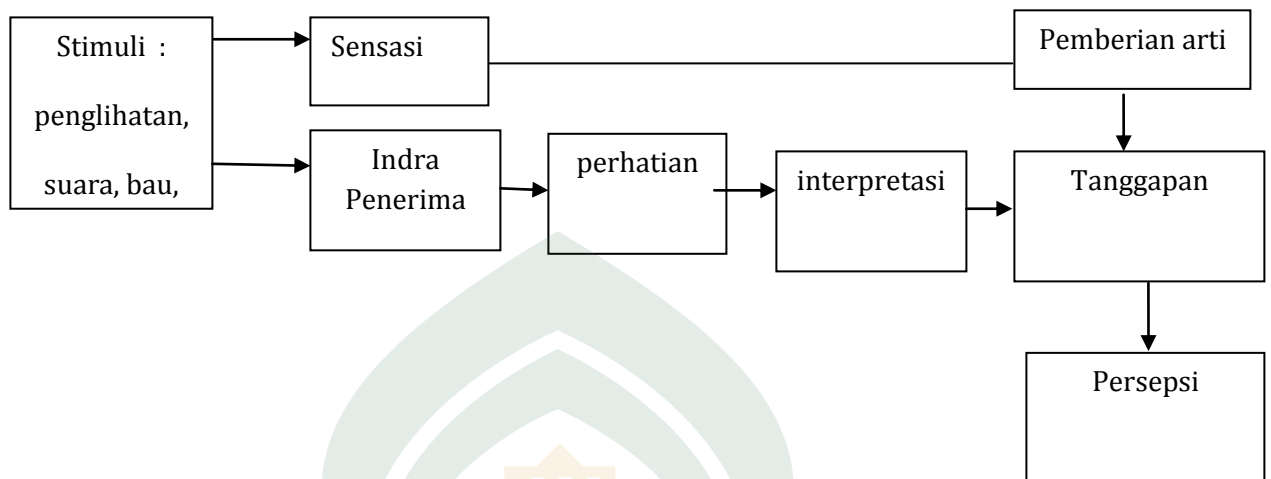
Persepsi terbentuk bila ada perhatian dari individu sesuai dengan kebutuhan individu. Kemampuan orang untuk mempersepsi stimulus yang sama akan ditafsirkan berbeda-beda oleh masing-masing individu. Proses penafsiran tergantung dari pengalaman masing-masing.

Tahap terpenting dalam persepsi adalah interpretasi atau penafsiran atas informasi yang kita peroleh dari salah satu indera kita. Namun kita tidak dapat menginterpretasikan makna setiap objek secara langsung, melainkan menginterpretasikan makna informasi yang kita peroleh melalui persepsi bukan pengetahuan mengenai objek yang sebenarnya, melainkan pengetahuan mengenai bagaimana tampaknya objek tersebut.

Akan tetapi kemampuan orang berbeda-beda dalam mengindra lingkungannya, karena mereka juga berbeda juga secara genetik, berbeda pengalaman dan pembelajaran, atau karena sebagian alat inderanya kurang berfungsi karena usia tua atau kecelakaan.⁴³

Dibawah ini merupakan gambaran proses terbentuknya persepsi menurut Salomon dalam Sutisna:

⁴³ Deddy Mulyani, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 169



Tabel 1: Proses terbentuknya Persepsi

Dari apa yang dijabarkan di atas, bahwa proses terbentuknya persepsi diawali dengan penginderaan terhadap stimulus yang kemudian menjadi perhatian. Setelah melewati proses perhatian dan atensi, akan diinterpretasikan oleh individu melalui pengalamannya, yang kemudian akan terbentuk sebuah persepsi. Kennet E. Anderson dalam Rakhmat mendefinisikan perhatian sebagai proses mental ketika stimuli atau rangkaian stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran dalam keadaan stimuli lainnya melemah. Kemudian perhatian atau atensi itu diinterpretasikan atau ditafsirkan dengan tanggapan yang berbeda-beda.⁴⁴

8. Faktor-faktor Penyebab Perbedaan Persepsi

Persepsi individu mengenai Sesuatu tentunya terdapat perbedaan. Sarlito Wirawan menjelaskan hal-hal yang menyebabkan perbedaan persepsi dari setiap orang, diantaranya adalah

⁴⁴ Jalaludin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi Suatu Pengantar* (Bandung :Remaja Rosdakarya, 2004), h. 52

Pertama, yakni perhatian. Biasanya orang tidak menangkap seluruh rangsangan yang ada disekitarnya sekaligus, tapi akan memfokuskan perhatiannya kepada satu atau dua objek saja, perbedaan focus tersebutlah yang membedakan perbedaan persepsi.

Kedua, yakni Set. Set adalah harapan seseorang akan rangsangan yang timbul. Misalnya seorang pelari yang siap *star*. Terdapat set bahwa akan terdengar bunyi akan terdengar pistol disaat ingin lari.

Ketiga adalah kebutuhan. Kebutuhan sesaat maupun menetap dalam diri seseorang, akan memengaruhi pula pada persepsi.

Keempat adalah sistem nilai. Sistem yang berlaku dalam suatu masyarakat berpengaruh pula pada persepsi.

Kelima yakni ciri kepribadian. Misalnya A dan B bekerja disuatu kantor. A seorang yang penakut akan mempersepsikan atasannya sebagai tokoh yang menakutkan. Sedangkan B yang penuh percaya diri, menganggap atasannya sebagai orang lain seperti biasa dan dapat di ajak bergaul.

Keenam adalah gangguan jiwa, hal ini akan menimbulkan kesalahan persepsi yang disebut halusinasi.⁴⁵

Menurut Ma'rat dalam buku Sifat Manusia, Perubahan dan Pengukuran menyebutkan ada beberapa factor yang mempengaruhi tingkat perbedaan persepsi seseorang, yaitu :

⁴⁵ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial* (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2006), h. 43-44

- a. Faktor pengalaman
- b. Faktor cakrawala
- c. Faktor belajar dan sosialisasi
- d. Faktor pengetahuan.

Faktor pengalaman, proses belajar, atau sosialisasi memberi bentuk struktur tentang apa yang dilihatnya, Sedangkan pengetahuan dan cakrawala memberi arti terhadap objek psikologis.⁴⁶

9. Teori Disonansi Kognitif

Teori Disonansi Kognitif dicetuskan oleh Leon Festinger (1957). Inti dari Teori Disonansi Kognitif adalah antara elemen-elemen kognitif mungkin terjadi hubungan yang pas (*Nonfitting Relation*) yang menimbulkan disonansi (kejanggalaan) kognitif; disonansi menimbulkan desakan untuk mengurangi disonansi tersebut dan menghindari peningkatannya. Hasil dari desakan itu terwujud dalam perubahan pada kognisi, perubahan tingkat laku, dan menghadapkan diri pada beberapa informasi dan pendapat-pendapat baru yang diseleksi terlebih dahulu.

Hal ini berarti *ketidaksesuaian antara kognisi sebagai aspek sikap dengan perilaku* yang terjadi pada seseorang. Orang yang mengalami disonansi akan berupaya mencari dalih untuk mengurangi disonansinya.⁴⁷

⁴⁶ Ma'rat, *Sifat Manusia, Perubahan, dan Pengukurannya* (Jakarta : Ghakia Indonesia, 1981), h. 22

⁴⁷ Onong Uchana Effendi, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), h. 263

Festinger juga memberikan penjelasan mengenai disonansi kognitif, elemen kognitif ialah mencakup pengetahuan, pandangan kepercayaan tentang lingkungan, tentang seseorang atau tindakan. Pengertian Disonansi ialah tidak cocoknya antara dua atau tiga elemen-elemen kognitif. Bila suatu elemen kognitif tidak cocok dengan elemen kognitif yang lain, hal ini akan menimbulkan disonansi.

Roger brown dalam buku Terori Komunikasi (analisis dan aplikasi) :

“Keadaan disonansi kognitif dikatakan sebagai keadaan ketidaknyamanan psikologi atau ketegangan yang memotivasi usaha-usaha untuk mencapai konsonansi. *Disonansi* adalah sebutan untuk ketidakseimbangan dan *Konsonansi* adalah sebutan untuk keseimbangan. Selanjutnya, Browns menyatakan bahwa teori ini memungkinan dua elemen untuk memiliki tiga hubungan yang berbeda satu sama lain: mungkin saja konsonan (*consonant*),disonan (*dissonant*), atau tidak relevan (*irrelevant*).

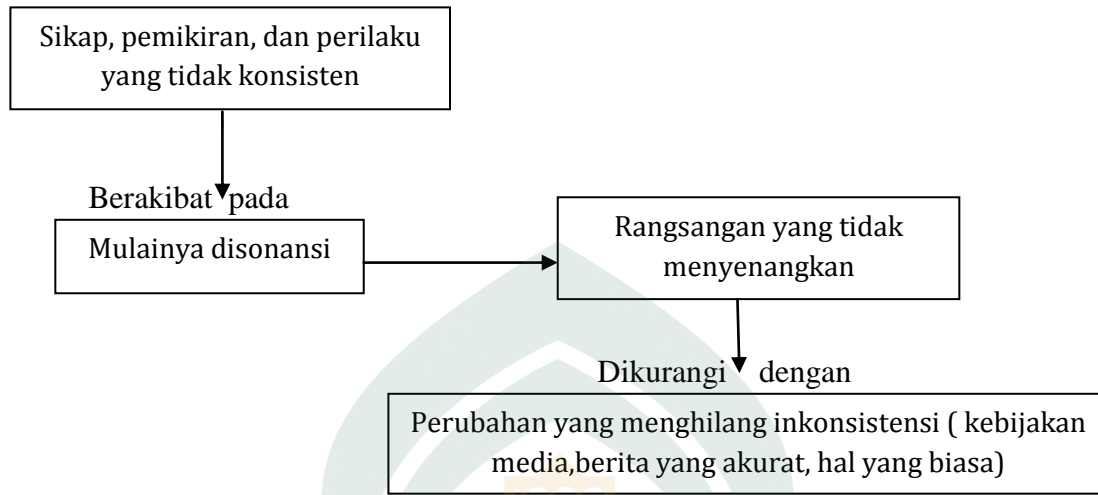
a. Hubungan Konsonan (*consonant relationship*)

Ada antara dua elemen ketika dua elemen tersebut ada pada posisi seimbang satu sama lain.

b. Hubungan disonan (*dissonant relationship*)

Berarti elemen-elemennya tidak seimbang satu sama lainnya.⁴⁸

⁴⁸ Richard West, Lynn H. Turner, *Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi* (Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2008), h. 137



Tabel 2 : Proses disonansi kognitif (West and Turner)

c. Hubungan tidak relevan (*irrelevant relationship*)

Hubungan tidak relevan ada ketika elemen-elemen tidak mengimplikasikan apa pun mengenai satu sama lain.

Pentingnya disonansi kognitif bagi peneliti komunikasi ditunjukkan dalam pernyataan Festinger bahwa ketidaknyamanan yang disebabkan oleh disonansi akan mendorong terjadinya perubahan. Teori ini menyatakan bahwa agar dapat menjadi persuasif, strategis-strategis harus berfokus pada inkonsisten sembari menawarkan perilaku baru yang memperlihatkan konsisten atau keseimbangan.⁴⁹

⁴⁹ Richard West, Lynn H. Turner, *Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi*. h. 138.

10. Asumsi Dasar Teori Disonansi Kognitif

Teori disonansi Kognitif adalah penjelasan mengenai bagaimana keyakinan dan perilaku mengubah sikap. Teori ini berfokus pada efek inkonsistensi yang ada diantara kognisi-kognisi. Di bawah ini ada empat asumsi dasar dari teori ini.⁵⁰

Pertama, manusia memiliki hasrat akan adanya konsistensi pada keyakinan sikap, dan perilakunya. Asumsi pertama ini menekankan pada sebuah model mengenal sifat dasar dari manusia yang mementingkan adanya stabilitas dan konsistensi.

Kedua, disonansi diciptakan oleh inkonsistensi psikologi. Asumsi ini berbicara mengenai jenis konsistensi yang penting bagi orang. Teori ini tidak berpegang pada konsistensi logis yang kaku. Sebaliknya, teori ini merujuk pada fakta bahwa kognisi-kognisi harus tidak konsisten secara psikologi (dibandingkan tidak konsisten secara logis) satu dengan yang lainnya untuk menimbulkan disonansi kognitif.

Ketiga, disonansi adalah perasaan tidak suka yang mendorong orang untuk melakukan tindakan-tindakan dengan dampak yang dapat diukur. Asumsi dari teori ini menyatakan ketika seseorang mengalami inkonsistensi psikologi disonansi yang tercipta menimbulkan perasaan tidak suka. Jadi, orang tidak senang berada pada keadaan disonansi; hal itu merupakan suatu keadaan yang tidak nyaman.

⁵⁰ Richard West, Lynn H. Turner, *Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi*. h. 139

Keempat, disonansi akan mendorong usaha untuk memperoleh konsonansi dan usaha untuk mengurangi disonansi. Asumsi ini mengatakan bahwa rangsangan yang diciptakan oleh disonansi akan memotivasi orang untuk menghindari situasi yang menciptakan inkonsistensi dan berusaha mencari situasi yang mengembalikan konsistensi. Jadi, gambaran akan sifat dasar manusia yang membingkai teori ini adalah sifat di mana manusia mencari konsistensi psikologi sebagai hasil dari rangsangan yang disebabkan oleh kondisi ketidaksenangan terhadap kognisi yang tidak konsisten.

Faktor-faktor motivasi dan keinginan juga berpengaruh di sini, sehingga menambah rumitnya persoalan. Misalnya seorang yang berjudi terus walaupun terus kalah melawan penjudi yang profesional.⁵¹

Menurut Festinger dalam Sarwono :

Pertama, inkonsistensi logis. Contohnya, keyakinan bahwa air membeku pada 0°C, secara logis tidak konsisten dengan keyakinan bahwa es balok tidak akan mencair pada 40°C.

Kedua adalah nilai-nilai budaya (*cultural mores*), kebudayaan seringkali menentukan apa yang disonansi dan konsonansi. Contoh, makan dengan tangan dipesta resmi di Eropa menimbulkan disonansi, tetapi makan dengan tangan di warung di Jakarta dirasakan sebagai konsonansi.

⁵¹ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial* (Jakarta : Rajagrafindo, 2006), h. 116

Ketiga adalah pendapat umum. Disonansi dapat terjadi karena suatu pendapat yang dianut orang banyak dipaksakan pada pendapat individu. Misalnya anak remaja yang suka menyanyi lagu keroncong. Hal ini akan menimbulkan disonansi karena pendapat umum percaya bahwa keroncong hanya merupakan kegemaran orang tua.

Meskipun teori disonansi kognitif menjelaskan bahwa disonansi dapat dikurangi baik melalui perubahan perilaku maupun sikap, kebanyakan penelitian difokuskan pada sikap. Banyak cara untuk meningkatkan konsistensi didasarkan pada kognisi.⁵²

Selain itu, Sarwono juga mengungkapkan cara-cara mengurangi disonansi, diantaranya sebagai berikut:

- a. Mengubah pendapat sendiri;
- b. Mempengaruhi orang-orang yang tidak setuju agar mengubah pendapat mereka;
- c. Membuat mereka yang setuju tidak sebanding dengan dirinya sendiri.

Dari uraian di atas bahwa dalam rangka pengubahan atau pembentukan sikap dapat melalui komponen kognitif. Komponen efektif, dan komponen konatif. Melalui komponen kognitif, yaitu dengan cara memberikan pengetahuan, pendapat, sikap atau hal-hal lainnya, sehingga dengan materi tersebut akan berubahlah komponen kognitifnya, hal ini akan mengubah komponen efektif, dan akhirnya sikap akan berubah. Melalui komponen efektif ialah memberikan hal-hal yang mengenai

⁵² Richard West, Lynn H. Turner, *Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi*. h. 141.

perasaan atau emosi, sehingga dengan berubahnya perasaan atau emosi, akan berubah pula segi kognitifnya, yang pada akhirnya akan berubah pula sikap, sesuai dengan teori Festinger mengubah sikap tidak melalui komponen kognitif maupun komponen efektif, tetapi melalui perilaku itu sendiri.⁵³

11. Disonansi Kognitif dan Persepsi

West dan Turner menguraikan hubungan antara teori disonansi kognitif dan persepsi. Secara spesifik, teori disonansi kognitif dan persepsi berkaitan dengan proses pemilihan terpaan (*selective exposure*), pemilihan perhatian (*selective attention*), pemilihan interpretasi (*selective interpretation*), dan pemilihan retensi (*selective retention*) karena teori ini memprediksi bahwa orang akan menghindari informasi yang meningkatkan disonansi. Proses perceptual ini merupakan dasar dari penghindaran ini.

- a. Terpaan selektif atau mencari informasi yang konsisten yang belum ada, membantu untuk mengurangi disonansi. CDT memprediksikan bahwa orang yang akan menghindari informasi yang meningkatkan disonansi dan mencari informasi yang konsisten dengan sikap dan perilaku mereka. Metode ini untuk mengurangi disonansi dengan mencari informasi yang konsonan dengan keyakinan dan tindakan yang ada saat ini.
- b. Perhatian selektif merujuk pada melihat informasi secara konsisten begitu konsisten itu ada. Orang memerhatikan informasi dalam lingkungannya yang

⁵³ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial* (Jakarta : Rajagrafindo, 2006), h. 120

sesuai dengan lingkungannya sementara tidak menghiraukan informasi yang tidak konsisten. Metode ini untuk mengurangi disonansi dengan memberikan perhatian pada informasi yang konsonan dengan keyakinan dan tindakan saat ini.

- c. Interpretasi selektif melibatkan penginterpretasian informasi yang ambigo sehingga menjadi konsisten. Dengan menggunakan interpretasi selektif, kebanyakan orang menginterpretasikan sikap teman dekatnya lebih sesuai dengan sikap mereka sendiri daripada yang sebenarnya terjadi. Metode ini untuk mengurangi disonansi yang menginterpretasikan informasi yang ambigo sehingga informasi ini menjadi konsisten dengan keyakinan dan tindakan yang ada pada saat ini.
- d. Retensi selektif merujuk pada mengingat dan mempelajari informasi yang konsisten dengan kemampuan yang lebih besar dibandingkan yang kita lakukan terhadap informasi yang tidak konsisten. Metode ini untuk mengurangi disonansi dengan mengingat informasi yang konsonan dengan keyakinan dan tindakan yang ada pada saat ini.⁵⁴

Bila teori ini dikaitkan dengan kasus yang ingin diteliti, dapat dijelaskan bahwa wartawan dengan kognisi, sikap, pemikiran atau keyakinan yang dia miliki yang dalam hal ini adalah kode etik jurnalistik, tidak sesuai dengan perilaku yang dia terapkan, atau dengan kata lain mengalami disonansi kognitif dalam mempersepsi

⁵⁴ Richard West, Lynn H. Turner, *Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi* (Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2008), h. 142

pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia). Hal ini bisa diketahui dari beberapa pemberitaan yang ditemukan yang tidak sesuai dengan kode etik Jurnalistik, khususnya pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia) yang menyatakan bahwa *“wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan”*. Namun dalam pemberitaan tersebut jelas bahwa nama dan identitas korban diberitakan dengan jelas.

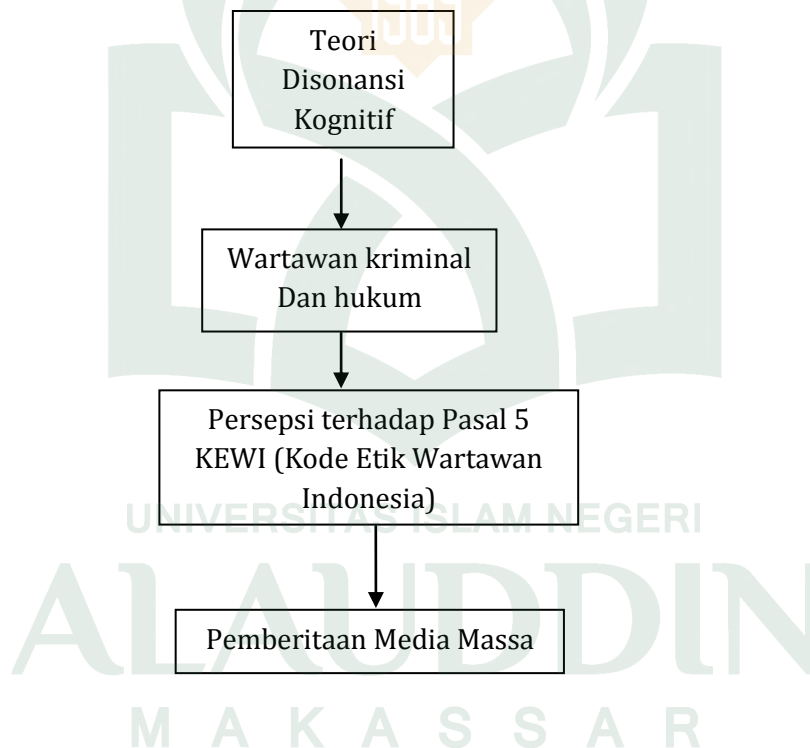
Hal ini berarti telah terjadi *tidaksesuaian antara kognisi* (pengetahuan/keyakinan wartawan mengenai kode etik jurnalistik) sebagai aspek sikap dengan perilaku (wartawan terhadap kode etik jurnalistik) yang terjadi pada diri seseorang, atau dengan kata lain wartawan tidak konsisten antara keyakinan, kognisi, pemikiran, dan perilaku yang ia terapkan, hal ini dapat dilihat dari pemberitaan yang peneliti temukan.

12. Kerangka Pikir

Dalam Pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia) menyatakan *“Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan”* dari fenomenal yang dijelaskan, terdapat kesenjangan antara ketidaksesuaian antara Kode Etik Jurnalistik sebagai aturan yang mengatur kerja wartawan dengan penerapannya. Dalam hal ini wartawan sebagai pencari berita dengan aturannya, sudah menjadi keharusan seorang wartawan untuk mematuhi dan menjalankan apa yang diamanatkan oleh Kode Etik jurnalistik.

Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dan praktek, antara aturan dan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan.

Persepsi wartawan terhadap Pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia) bisa saja berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, mengenai penyebutan identitas dalam peristiwa oleh pemberitaan. Untuk menyederhanakannya, peneliti mencoba membuat kerangka pemikiran sebagai berikut :



Tabel 3: Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskripsi. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Hasil akhir dari penelitian ini biasanya berupa tipologi atau pola-pola mengenai fenomena yang sedang dibahas.⁵⁵

Penulis menggunakan tehnik sampel *purposive* ini juga disebut *judgmental sampling* yang digunakan dengan menentukan kriteria khusus terhadap sampel, terutama orang-orang yang dianggap ahli.⁵⁶

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. Sedangkan, waktu penelitian yang digunakan dalam proses penelitian ini berkisar 4 bulan, terhitung sejak pengesahan draft proposal, penerbitan surat rekomendasi penelitian, hingga pengajuan hasil riset.

B. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan kusioner sebagai intrumen penelitian. Kusioner merupakan lembaran yang berisi beberapa pertanyaan

⁵⁵ Bambang prasetyo, Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Rajawali pers, 2013) h. 42.

⁵⁶ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah. *Metode Penelitian Kuantitatif* . h. 135

dengan struktur yang baku. Dalam pelaksanaan survei, kondisi penelitian tidak dimanipulasi oleh peneliti.⁵⁷

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁵⁸

Dalam penelitian ini, populasi yang menjadi responden adalah seluruh wartawan kriminal dan hukum yang berada di Kota Makassar dari media cetak, televisi, online/internet maupun radio.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.⁵⁹

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel wartawan di Kota Makassar yang berjumlah 30 orang yang mempunyai *jobs desk* kriminal dan hukum.

D. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan kusionar (angket), karena metode penelitian ini sendiri yang menggunakan metode survei. Kusioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

⁵⁷ Bambang prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitati*. h. 49.

⁵⁸ Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian* (Cetakan ke 12 Bandung : Alfabeta, 2012), h.61.

⁵⁹ Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian*. h. 62

memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.⁶⁰

E. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah angket (kusioner) dengan menggunakan skala Likert. Skala likert dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur persepsi wartawan peliput berita kriminal dan hukum di Makassar terhadap pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia). Seperti yang dikatakan Sugiyono, Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial.⁶¹

Dalam Skala Likert, akan dibuat serangkaian pernyataan dalam angket yang diisi oleh responden. Setiap responden diminta untuk menjawab dan mengisi pernyataan dalam angket yang mengacu pada pengukuran skala likert, dengan pilihan sebagai berikut:

- 1) STS (sangat tidak setuju)
- 2) TS (tidak setuju)
- 3) S (setuju)
- 4) SS (sangat setuju)

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R dan D.* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 142

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R dan D.* h. 93.

F. uji validitas dan Realibilitas

1. uji validitas

Salah satu instrument dalam penelitian ini adalah angket (kusioner). Sebuah instrument memiliki kriteria yang baik apabila setelah di lakukan uji validitas dan realibilitas. Validitas dimaksudkan untuk menyatakan sejauh mana instrument (misalnya kusioner) akan mengukur apa yang ingin diukur.⁶²

Data yang digunakan dalam uji validitas dan realibilitas ini adalah Skala Ordinal. Tingkat ukuran ordinal banyak digunakan dalam penelitian sosial terutama untuk mengukur kepentingan, sikap, atau persepsi.⁶³

Tehnik untuk menguji validitas yang dipakai adalah dengan koofesian korelasi *Rank Spearmen*. Penghitungan korelasi *Rank Spearmen* banyak digunakan untuk mengukur data ordinal. Jika ditemukan $t \text{ hitung} \geq t \text{ table}$ maka alat tersebut valid.⁶⁴

2. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas instrument dapat dilakukan secara eksternal maupun internal. Secara eksternal pengujian dapat dilakukan dengan test-resest (*stability*), equivalent, dan gabungan keduanya. Secara internal reliabilitas instrument dapat di uji dengan menganalisis kosisntensi butir-butir yang ada pada instrument dengan tehnik tertentu.

⁶² Rahmat Kriyantono, *Tekhnik Praktis Riset Komunikasi*. h. 141

⁶³ Masri Singarimbun dan Soffian Effendy, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 2006), h.102

⁶⁴ Singgih Santoso, *Menguasai Statistik dengan SPSS 15* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007), h. 232

G. Analisi Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca atau diinterpretasikan. Dalam proses ini seringkali digunakan statistik.⁶⁵

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Jenis riset ini bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual, akurat tentang fakta-fakta dan sifat populasi atau objek tertentu.

Untuk mengolah data angket (kusioner), akan digunakan statistik deskriptif dengan program statistik SPSS untuk mencari distribusi frekuensi dan tendensi sentral (mean). Pertama dengan submenu *frequencies* yang akan memberikan gambaran sekilas dan ringkas (*first look*) dari sekelompok data.



⁶⁵ Masri Singarimbun dan Soffian Effendy, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 2006), h.263

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Wartawan atau jurnalis ialah seseorang yang melakukan kegiatan jurnalistik yaitu orang yang secara teratur menuliskan berita (berupa laporan) yang tulisannya dikirimkan atau dimuat di media massa secara teratur. Di kota Makassar terdapat beberapa media lokal yang setiap hari menyuguhkan berita atau informasi menarik kepada khalayak atau pembacanya. Wartawan mencari sumber mereka untuk ditulis dalam laporannya dan mereka diharapkan menuliskan laporan yang paling objektif dan tidak memiliki pandangan dari sudut tertentu untuk melayani masyarakat.

Beberapa media cetak yang berada di kota Makassar antara lain, Koran fajar, Tribun Timur, Harian Rakyat Sulsel, Ujung pandang Expres, Koran Sindo, Koran Tempo, Koran Kompas dan Berita Kota Makassar.

Sedangkan media televisi antara lain, TVRI, Fajar TV, Celebes TV, Kompas TV, Trans TV biro Makassar, TVone biro Makassar, dan Vchanel TV.

Dari media radio ada dari Radio Gamasi, Fajar FM, RRI dan Smart FM.

Dari media online (internet) ada Tribun Timur.com, Fajar.com, dan Berita Kota Makassar.com.

B. Hasil Penelitian

a. Pengetahuan wartawan kriminal dan hukum di Makassar terhadap Pasal

5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia)

1. Apakah anda mengetahui tentang pasal 5 KEWI (Kode etik wartawan indonesia) yaitu wartawan indonesia tidak menyebut identitas anak yang menjadi korban kejahatan asusila dan tidak menyiarkan identitas pelaku kejahatan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat tidak mengetahui	0	0	0	0
	tidak mengetahui	1	3.3	3.3	3.3
	sangat mengetahui	5	16.7	16.7	20.0
	Mengetahui	24	80.0	80.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Tabel 4 (hasil analisis SPSS)

Dari tabel distribusi frekuensi di atas, dapat diketahui mayoritas responden (80%) atau 24 orang menyatakan mereka mengetahui tentang Pasal 5 KEWI (kode etik wartawan Indonesia), responden yang menjawab sangat mengetahui (16,7%) dengan jumlah 5 orang, sedangkan yang menjawab tidak mengetahui (3,3%) atau hanya satu orang saja.

2. Dalam tugas jurnalistik wartawan menerapkan Pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat tidak setuju	0	0	0	0
Tidak setuju	0	0	0	0
sangat setuju	9	30.0	30.0	30.0
Setuju	21	70.0	70.0	100.0
Total	30	100.0	100.0	

Tabel 5 (hasil analisis SPSS)

Dari tabel distribusi frekuensi di atas, dapat diketahui mayoritas responden menyatakan setuju (70%) atau 21 orang menyatakan setuju. Artinya sebagian besar wartawan peliput berita kriminal dan hukum di Makassar setuju bahwa dalam tugas jurnalistik mereka menerapkan Kode Etik Jurnalistik pasal 5, hal ini dikuatkan dengan jawaban sangat setuju (30%) dari responden atau 9 orang yang menyatakan sangat setuju.

3. Menurut anda apakah identitas anak adalah yang menyangkut diri seseorang memudahkan orang lain melacak nama, tempat dan keluarga yang bersangkutan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid sangat tidak setuju	1	3.3	3.3	3.3
tidak setuju	2	6.7	6.7	10.0
sangat setuju	9	30.0	30.0	40.0
Setuju	18	60.0	60.0	100.0
Total	30	100.0	100.0	

Tabel 6 (hasil analisis SPSS)

Dari tabel distribusi frekuensi di atas, dapat diketahui mayoritas responden (60%) atau 18 orang menyatakan setuju. Artinya sebagian besar wartawan peliput

berita kriminal dan hukum di Makassar menyatakan setuju bahwa identitas merupakan data dan informasi yang mudah di akses oleh orang lain. Hal ini dikuatkan dengan jawaban sangat setuju (30%) atau 9 orang. Selanjutnya yang menjawab tidak setuju 2 orang (6.3%), dan sisa 1 orang (3,3%) menyatakan sangat tidak setuju.

4. Pelatihan dan pendidikan mengenai Kode Etik Jurnalistik diperlukan wartawan dalam penerapan pasal 5 KEWI (kode etik wartawan Indonesia).

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat tidak setuju	0	0	0	0
	tidak setuju	1	3.3	3.3	3.3
	sangat setuju	14	46.7	46.7	50.0
	Setuju	15	50.0	50.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Tabel 6 (hasil analisis SPSS)

Dari tabel distribusi frekuensi di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan setuju (50%) atau 15 orang. Selanjutnya dikuatkan dengan responden yang menyatakan sangat setuju (46%) atau 14 orang. Artinya seluruh wartawan peliput berita kriminal dan hukum di Makassar setuju bahwa pelatihan dan pendidikan mengenai kode etik sangat diperlukan dalam penerapan pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia). Sedangkan yang menjawab tidak setuju (3,3%) atau 1 responden saja.

5. Sebagai pedoman dan tuntutan profesi, Kode Etik Jurnalistik tidak hanya sebagai nilai yang ideal saja tetapi, harus terkait langsung praktek jurnalistik

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat tidak setuju	0	0	0	0
	Tidak setuju	0	0	0	0
	sangat setuju	12	40.0	40.0	40.0
	Setuju	18	60.0	60.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Tabel 7 (hasil analisis SPSS)

Berdasarkan tabel frekuensi di atas, dapat diketahui mayoritas responden menyatakan setuju (60,0%) atau 18 orang. Dikuatkan dengan responden yang menyatakan sangat setuju (40%) atau 12 orang. Artinya seluruh wartawan peliput berita kriminal dan hukum di Makassar menyetujui bahwa Kode etik Jurnalistik harus terkait langsung dengan prakteknya.

a) Presentase akumulasi indikator pengetahuan

Pilihan jawaban	Jawaban responden
Sangat tidak setuju (STM)	1
Tidak setuju (TM)	4
Setuju (M)	95
Sangat setuju (SM)	49
Total	149

Tabel 8 : presentase hasil akumulasi indikator pengetahuan

Jumlah skor akumulasi yang menjawab 4 : $4 \times 49 = 196$

Jumlah skor akumulasi yang menjawab 3 : $3 \times 95 = 285$

Jumlah skor akumulasi yang menjawab 2 : $2 \times 4 = 8$

Jumlah skor akumulasi yang menjawab 1 : $1 \times 1 = 1$

Jumlah = 490

Jumlah skor sub kategori pengetahuan :

Skor tertinggi (untuk jawaban sangat setuju) : $4 \times 149 = 596$

Maka $490/596 \times 100\% = 82.2\%$, **tergolong tinggi**

Dari hasil perhitungan akumulasi jawaban tahap pengetahuan dapat menggunakan perhitungan Likert, dapat diketahui pengetahuan wartawan peliput berita kriminal dan hukum di Makassar tergolong tinggi. Hal ini bisa ditunjukkan dari akumulasi presentase mencapai 82.2%.

b. Sikap wartawan kriminal dan hukum di Makassar terhadap pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia)

6. Meliput dan menulis berita asusila harus sesuai dengan pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sangat tidak setuju	1	3.3	3.3	3.3
	tidak setuju	1	3.3	3.3	6.7
	sangat setuju	9	30.0	30.0	36.7
	Setuju	19	63.3	63.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Tabel 9 (hasil analisis SPSS)

Dari tabel distribusi frekuensi di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan setuju (63,3%) atau 19 orang responden. Sedangkan yang

menyatakan sangat setuju (30%) 9 orang. Artinya sebagian besar wartawan peliput berita kriminal dan hukum di Makassar menyetujui bahwa meliput dan menulis berita asusila harus sesuai dengan Kode Etik jurnalistik pasal 5. Sedangkan yang menyatakan tidak setuju (3,3%) atau 1 orang dan yang menyatakan sangat tidak setuju (3,3%) atau 1 orang responden saja.

7. Setujukah anda kebijakan redaksi mengharuskan menyebut dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan pelaku kejahatan anak di bawah umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat setuju	0	0	0	0
	Setuju	4	13.3	13.3	13.3
	sangat tidak setuju	10	33.3	33.3	46.7
	tidak setuju	16	53.3	53.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Tabel 10 (hasil analisis SPSS)

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden menjawab tidak setuju (53,3%) atau 16 orang responden. Artinya sebagian besar wartawan peliput berita kriminal dan hukum Makassar tidak menyetujui kebijakan redaksi mengharuskan penyebutan dan penyiaran identitas korban kejahatan asusila dan pelaku kejahatan anak di bawah umur. Dikuatkan lagi dengan responden yang menyatakan tidak setuju (33,3%) atau 10 orang responden. Sedangkan yang menyatakan setuju (13,3%) atau hanya 4 orang responden saja.

8. Menurut anda wartawan sebagai komunikator memiliki fungsi informasi, namun harus mempertimbangkan nama baik dari korban asusila dan pelaku kejahatan asusila oleh anak di bawah umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat tidak setuju	0	0	0	0
	Tidak setuju	0	0	0	0
	sangat setuju	14	46.7	46.7	46.7
	Setuju	16	53.3	53.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Tabel 11 (hasil analisis SPSS)

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas, bahwa mayoritas responden menyatakan setuju (53,3%) atau sebanyak 16 orang. Dikuatkan lagi responden yang menyatakan sangat setuju (46,7%) sebanyak 14 orang. Artinya seluruh wartawan peliput berita kriminal dan hukum Makassar setuju bahwa mereka mempertimbangkan nama baik korban asusila dan pelaku kejahatan asusila oleh anak di bawah umur untuk dipublikasikan ke khalayak.

9. Apakah wartawan punya hak untuk menyebutkan dan menyiarkan korban kejahatan asusila dan pelaku kejahatan anak di bawah umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sangat setuju	1	3.3	3.3	3.3
	Setuju	7	23.3	23.3	26.7
	Sangat tidak setuju	7	23.3	23.3	50.0
	tidak setuju	15	50.0	50.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Tabel 12 (hasil analisis SPSS)

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas, bahwa dapat di ketahui mayoritas responden menjawab tidak setuju (50%) atau 15 orang responden. Artinya sebagian besar wartawan peliput berita kriminal dan hukum Makassar tidak

menyetujui bahwa wartawan berhak menyebut dan menyiarkan identitas korban asusila dan pelaku kejahatan oleh anak di bawah umur. Responden yang menjawab sangat tidak setuju (23,3%) atau 7 orang. Sedangkan yang menjawab setuju (23,3%) atau 7 orang dan sisanya yang menjawab sangat setuju (3,3%) atau hanya 1 orang responden saja.

10. Menurut anda wartawan wajib menyembunyikan dan melindungi identitas korban kejahatan asusila dan pelaku kejahatan asusila oleh anak di bawah umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat tidak setuju	0	0	0	0
	tidak setuju	1	3.3	3.3	3.3
	sangat setuju	6	20.0	20.0	23.3
	Setuju	23	76.7	76.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Tabel 13 (hasil analisis SPSS)

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas, dapat diketahui mayoritas responden menyatakan setuju (76,7%) atau 23 orang. Artinya sebagian besar wartawan peliput berita kriminal dan hukum Makassar setuju bahwa wartawan wajib menyembunyikan identitas korban maupun pelaku kejahatan oleh anak di bawah umur. Selanjutnya dikuatkan oleh responden yang menjawab sangat setuju (20%) atau 6 orang responden. Sedangkan yang menjawab tidak setuju (3,3%) atau hanya 1 orang saja.

11. Menurut anda apakah Pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia) merupakan rambu-rambu yang tepat untuk mengatur jalan kerja wartawan ketika meliput dan menulis berita kasus asusila

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat tidak setuju	0	0	0	0
	Tidak setuju	0	0	0	0
	sangat setuju	7	23.3	23.3	23.3
	Setuju	23	76.7	76.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Tabel 14 (hasil analisis SPSS)

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas, dapat diketahui mayoritas responden menyatakan setuju (76,7%) atau 23 orang responden. Artinya seluruh wartawan peliput berita kriminal dan hukum Makassar menyatakan setuju jika pasal 5 merupakan rambu-rambu yang tepat untuk mengatur jalan kerja ketika meliput dan menulis berita kasus asusila. Dikuatkan lagi dengan pernyataan sangat setuju (23,3%) atau 7 orang responden.

12. Setujukah anda wartawan yang mengabaikan kode etik jurnalistik akan menghancurkan kredibilitas dan citra pers secara umum di mata actual

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat tidak setuju	0	0	0	0
	Tidak setuju	0	0	0	0
	sangat setuju	10	33.3	33.3	33.3
	Setuju	20	66.7	66.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Tabel 15 (hasil analisis SPSS)

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan setuju (66,7%) atau 20 orang responden. Artinya

seluruh wartawan peliput berita kriminal dan hukum Makassar menyatakan setuju jika wartawan yang mengabaikan Kode Etik jurnalistik akan menghancurkan kredibilitas dan citra pers di mata umum dan di mata aktual. Di kuatkan dengan pernyataan responden yang sangat setuju (33,3%) atau 10 orang responden.

13. Pendapat anda pelarangan menyebut nama dan identitas korban kejahatan asusila dan pelaku kejahatan oleh anak di bawah umur dasarnya semata-mata mempertimbangkan masa depan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat tidak setuju	0	0	0	0
	tidak setuju	2	6.7	6.7	6.7
	sangat setuju	9	30.0	30.0	36.7
	setuju	19	63.3	63.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Tabel 16 (hasil analisis SPSS)

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas wartawan menyatakan setuju (63,3%) atau 19 orang responden. Artinya mayoritas wartawan peliput berita kriminal dan hukum Makassar menyatakan setuju bahwa larangan penyebutan nama korban dan pelaku kejahatan anak di bawah umur dasarnya semata-mata mempertimbangkan masa depannya. Di kuatkan lagi dengan pernyataan responden yang sangat setuju (30%) atau 9 orang. Sedangkan sisanya minoritas yang menyatakan tidak setuju (6,7%) atau 2 orang responden saja.

14. Merasa tersiksa ketika menulis kasus asusila tanpa menyebut dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan pelaku kejahatan anak di bawah umur

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat setuju	0	0	0	0
Setuju	3	10.0	10.0	10.0
sangat tidak setuju	7	23.3	23.3	33.3
tidak setuju	20	66.7	66.7	100.0
Total	30	100.0	100.0	

Tabel 17 (hasil analisis SPSS)

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan tidak setuju (66,7%) atau 20 orang responden. Artinya sebagian besar wartawan peliput berita kriminal dan hukum di Makassar tidak setuju atau mereka tidak merasa tersiksa ketika menulis kasus asusila tanpa menyebut dan menyiarkan identitas korban dan pelaku kejahatan anak di bawah umur. Hal ini dikuatkan oleh responden yang menyatakan sangat tidak setuju (23,3%) atau 7 orang responden. Sedangkan sisanya minoritas yang menyatakan setuju (10%) atau 3 orang responden saja.

b) Presentase Akumulasi Indikator Sikap

Pilihan jawaban	Jawaban responden
Sangat tidak setuju	1
Tidak setuju	18
Setuju	172
Sangat setuju	79

Total	270
-------	-----

Tabel 18 presentase hasil akumulasi indikator sikap

Jumlah skor akumulasi yang menjawab 4 : $4 \times 79 = 316$

Jumlah skor akumulasi yang menjawab 3 : $3 \times 172 = 516$

Jumlah skor akumulasi yang menjawab 2 : $2 \times 18 = 36$

Jumlah skor akumulasi yang menjawab 1 : $1 \times 1 = 1$

Jumlah = 869

Jumlah skor sub kategori sikap :

Skor tertinggi (untuk jawaban sangat setuju) : $4 \times 270 = 1080$

Maka : $869/1080 \times 100\% = 80,4\%$ tergolong tinggi

Dari hasil perhitungan akumulasi jawaban kategori sikap dengan menggunakan Likert, dapat diketahui sikap wartawan peliput berita kriminal dan hukum di Makassar yang meliputi pendapat, emosi, dan perhatian tergolong tinggi. Hal ini dapat dilihat dari akumulasi presentasi mencapai **80,4%**.

c. Perilaku wartawan kriminal dan hukum di Makassar terhadap Pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia)

- 15. Untuk menarik minat masyarakat untuk menonton berita atau membaca koran anda, anda harus menyebut dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan pelaku kejahatan oleh anak di bawah umur**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat setuju	0	0	0	0
Setuju	3	10.0	10.0	10.0
sangat tidak setuju	6	20.0	20.0	30.0
tidak setuju	21	70.0	70.0	100.0

15. Untuk menarik minat masyarakat untuk menonton berita atau membaca koran anda, anda harus menyebut dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan pelaku kejahatan oleh anak di bawah umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat setuju	0	0	0	0
	Setuju	3	10.0	10.0	10.0
	sangat tidak setuju	6	20.0	20.0	30.0
	tidak setuju	21	70.0	70.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Tabel 19 (hasil analisis SPSS)

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan tidak setuju (70%) atau 21 orang. Artinya wartawan peliput berita kriminal dan hukum di Makassar tidak menyetujui untuk menarik minat masyarakat, wartawan harus menyebut dan menyiarkan identitas korban dan pelaku kejahatan oleh anak di bawah umur. Hal ini dikuatkan oleh responden yang menyatakan sangat tidak setuju (20%) atau 6 orang. Sedangkan sisanya minoritas yang menyatakan setuju (10%) atau 3 orang responden.

16. Wartawan harus menyebut dan menyiarkan identitas pelaku kejahatan oleh anak di bawah umur.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sangat setuju	1	3.3	3.3	3.3
	sangat tidak setuju	6	20.0	20.0	23.3
	Setuju	8	26.7	26.7	50.0
	tidak setuju	15	50.0	50.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Tabel 20 (hasil analisis SPSS)

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas, dapat diketahui mayoritas responden menyatakan tidak setuju (50%) atau 15 orang menolak bahwa agar mendapatkan efek jera wartawan harus menyebut dan menyiarkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Di kuatkan lagi dengan jawaban sangat tidak setuju 6 orang (20%). Sedangkan yang menjawab setuju sebanyak 8 orang (26,7%), dan sisanya menyatakan sangat setuju yaitu 1 orang (3,3%).

17. Menggunakan kebebasan pers untuk motif dan tujuan pribadi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat setuju	0	0	0	0
setuju	3	10.0	10.0	10.0
tidak setuju	13	43.3	43.3	53.3
sangat tidak setuju	14	46.7	46.7	100.0
Total	30	100.0	100.0	

Tabel 21(hasil analisis SPSS)

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan sangat tidak setuju (46,7%) atau 14 orang responden. Artinya sebagian besar wartawan peliput berita kriminal dan hukum di Makassar sangat tidak setuju jika menggunakan kebebasan pers untuk motif dan tujuan pribadi. Hal ini dikuatkan oleh responden yang menyatakan tidak setuju (43,3%) atau 13 orang responden. Sedangkan sisanya minoritas menyatakan setuju (10%) atau 3 orang responden saja.

c) Presentase Akumulasi Indikator Perilaku

Pilihan jawaban	Jawaban responden
-----------------	-------------------

Sangat tidak setuju	1
Tidak setuju	14
Setuju	49
Sangat setuju	26
Total	90

Tabel 22 (hasil analisis SPSS)

Jumlah skor akumulasi yang menjawab 4 : $4 \times 26 = 104$

Jumlah skor akumulasi yang menjawab 3 : $3 \times 49 = 147$

Jumlah skor akumulasi yang menjawab 2 : $2 \times 14 = 28$

Jumlah skor akumulasi yang menjawab 1 : $1 \times 1 = 1$

Jumlah = 280

Jumlah skor kategori perilaku :

Skor tertinggi (untuk jawaban sangat tinggi) : $4 \times 90 = 360$

maka : $280/360 \times 100\% = 77,7\%$ tergolong tinggi

dari hasil perhitungan akumulasi jawaban kategori perilaku dengan menggunakan perhitungan Likert, dapat diketahui perilaku wartawan peliput berita kriminal dan hukum di Makassar yang meliputi kepentingan dan tujuan tergolong tinggi. Hal ini bisa ditunjukkan dari akumulasi presentase mencapai **77,7%**.

C. Pembahasan

Dari hasil survei melalui kusioner yang telah diolah dari setiap pernyataan maka hasil dari data yang telah diolah tersebut akan dianalisis lagi berdasarkan

indikator atau sub variabel. Sub variabel tersebut adalah pengetahuan, sikap dan perilaku.

1. Pengetahuan wartawan kriminal dan hukum di Makassar terhadap pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia)

Indikator pengetahuan yang mencakup alat-alat indera seperti indera peraba, penglihatan, penciuman, perasa dan pendengaran yang berfungsi menerima informasi, maka manusia memperoleh pengetahuan.

Dari hasil kusioner yang telah diolah, pertama pengetahuan tentang Pasal 5, mayoritas wartawan peliput berita kriminal dan hukum di Makassar mengetahui tentang pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia) dengan presentase 96,7% akumulasi pernyataan sangat mengetahui dan mengetahui . Sehingga dapat diketahui mayoritas wartawan sangat mengetahui pasal 5 KEWI (Kode Etik wartawan Indonesia) .

Kedua, dalam tugas jurnalistik mayoritas wartawan peliput berita kriminal dan hukum di Makassar sepakat atau setuju bahwa wartawan Indonesia tidak menyebut dan menyiarkan identitas korban kejahatan dan anak yang menjadi pelaku kejahatan. Hal ini ditunjukkan dengan akumulasi jawaban sangat setuju dan setuju yaitu 100%. Sehingga dapat diketahui seluruh wartawan peliput berita kriminal dan hukum di Makassar menyatakan sepakat bahwa dalam tugas jurnalistik seorang wartawan wajib taat pada pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia).

Ketiga, dalam penjelasan atau pengertian identitas dari pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia), bahwa yang dimaksud dengan identitas adalah semua data

dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak seperti nama, alamat, umur dan keluarga yang bersangkutan. Dari kusioner yang telah diolah dan di analisis, wartawan peliput berita kriminal dan hukum di Makassar membenarkan dan menyetujui bahwa pengertian dari identitas yakni data dan informasi dari korban asusila dan anak di bawah umur yang menjadi pelaku kejahatan, yang bisa dilacak atau diketahui masyarakat luas. Hal ini bisa di tunjukkan dari presentase sangat setuju dan setuju yaitu 90%.

Keempat dari pernyataan pendidikan, mayoritas wartawan peliput berita kriminal dan hukum di Makassar sepakat bahwa pendidikan mengenai Kode Etik Jurnalistik diperlukan untuk penerapan pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indoensia) dengan presentase jawaban setuju mencapai 50%. Hal ini dikuatkan dengan jawaban sangat setuju yang mencapai 46%. Sehingga akumulasi presentasi kedua jawaban tersebut mencapai 96%. Dalam kegiatan komunikasi, kerangka rujukan mempengaruhi bagaimana orang memberi makna pada pesan yang diterimanya.⁶⁶

Dalam kasus ini, persepsi mayoritas wartawan peliput berita kriminal dan hukum di Makassar memberikan pandangan bahwa kerangka rujukan yang dalam hal ini adalah latar belakang pendidikan, berpengaruh terhadap kode etik (Pasal 5 KEWI) dan penerapannya.

⁶⁶ Jalaludin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi Suatu Pengantar* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004), h. 58

Kelima, seluruh wartawan menyetujui bahwa kode etik jurnalistik Pasal 5 sebagai pedoman dan tuntutan profesi. Sebanyak 100% akumulasi jawaban dari pernyataan sangat setuju dan setuju. Dapat diketahui wartawan peliput berita kriminal hukum di Makassar memahami dan mengerti bahwa kode etik jurnalistik mempunyai posisi sempurna untuk mengatur tugas jurnalistiknya dalam hal ini meliput dan menulis kasus asusila. Seorang wartawan meskipun dalam tugas dijamin kebebasannya, tetapi wajib menaati pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia) dengan menjamin, merahasiakan, dan melindungi identitas korban asusila dan anak yang menjadi pelaku kejahatan. Meskipun seorang wartawan harus memberikan informasi kepada khalayak/masyarakat, bukan berarti dalam pemberitaan identitas korban dan pelaku tersebut harus disebutkan. Tentunya ini akan mencemarkan nama yang tersangkut kasus kriminal. Sehingga kebebasan yang telah dijamin menghilangkan tanggung jawab terhadap masyarakat.

Dalam Teori disonansi kognitif, elemen kognitif berhubungan dengan hal-hal nyata yang ada di lingkungan dan hal-hal yang terdapat dalam dunia kejiwaan seseorang. Hubungan tersebut dibedakan dalam 3 jenis yakni tidak relevan, disonan, dan konsonan.⁶⁷

⁶⁷ Sarlito Wirawan, Sarwono. *Teori-teori Psikologi Sosial* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), h. 115

Konsonan adalah keadaan di mana terjadi hubungan yang relevan antara dua elemen dan hubungan itu tidak disonan.⁶⁸ Jadi elemen yang saling terkait itu memiliki hubungan yang relevan atau berada pada posisi yang seimbang antara dua elemen.

Tahap paling awal dalam penerimaan pesan ialah sensasi. Sensasi berasal dari kata *sense*. Artinya alat penginderaan yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Melalui alat indera, manusia dapat memahami kualitas fisik lingkungannya. Melalui alat inderalah manusia memperoleh pengetahuan dan semua kemampuan untuk berinteraksi dengan dunianya.⁶⁹

Dalam tahap sensasi atau penginderaan, wartawan, dalam proses memahami dan mempelajari pasal 5 KEWI (Kode etik Wartawan Indonesia) adalah dengan membaca (menggunakan indera penglihatan), berinteraksi dan bersosialisasi dengan rekan seprofesi dan lingkungannya (menggunakan indera pendengaran), dengan membaca dan berinteraksi dengan alat inderanya, wartawan menerima informasi dari lingkungannya. Sehingga wartawan memperoleh pengetahuan mengenai Pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia).

2. Sikap wartawan kriminal dan hukum di Makassar terhadap Pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia)

Berdasarkan indikator sikap dari hasil kuesiner yang meliputi faktor pendapat, emosi yang bersangkutan (senang-tidak senang, setuju-tidak setuju, maupun baik-tidak baik) dan motivasi. Terdapat persepsi yang beragam dari jawaban yang

⁶⁸ Sarlito Wirawan, Sarwono. *Teori-teori Psikologi Sosial*. h, 116

⁶⁹ Jalaludin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi Suatu Pengantar* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004), h. 49

disediakan. Dari hasil kuesioner, pertama yakni mayoritas wartawan peliput berita kriminal dan hukum di Makassar dengan akumulasi persentase 93.3% yang merupakan gabungan dari jawaban sangat setuju dan setuju. Mereka sepakat bahwa dalam penulisan berita kasus asusila yang melibatkan korban maupun pelaku kejahatan oleh anak di bawah umur sesuai dengan Pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia). Ini menandakan sebagian besar sepakat atau menyetujui bila menulis kasus asusila harus memperhatikan Pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia).

Kedua, jawaban mayoritas wartawan peliput berita kriminal dan hukum di Makassar tidak sepakat atau tidak menyetujui bila redaksi mengharuskan untuk menyebut dan menyiarkan identitas korban dan pelaku kejahatan oleh anak di bawah umur. Hal ini bisa dilihat dari akumulasi presentase yang menjawab sangat tidak setuju dan tidak setuju yang mencapai 86,6% sedangkan sisanya minoritas wartawan yang menyetujui menyebut identitas tersebut. Kebijakan redaksi memiliki kepentingan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan medianya. Untuk mencapai tujuan itu, redaksi melibatkan wartawan untuk mendukung kepentingan tersebut. Namun dalam kasus ini, mayoritas wartawan peliput berita kriminal dan hukum di Makassar tidak sepakat atau tidak sejalan dengan kepentingan redaksi yang menginginkan penyebutan identitas tersebut. Karena memang berbenturan dengan kepentingan yang tercantum dalam Pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia), yang menginginkan perlindungan atas identitas tersebut.

Ketiga, seluruh wartawan peliput berita kriminal dan hukum di Makassar sepakat untuk melindungi nama baik dari korban asusila dan pelaku kejahatan oleh anak di bawah umur dengan tidak menyebut dan menyiarkan identitasnya. Hal ini bisa ditunjukkan dari akumulasi presentase dari jawaban sangat setuju dan setuju yang mencapai 100%.

Selanjutnya pernyataan keempat, pelarangan menyebut dan menyiarkan identitas korban dan pelaku yang masih di bawah umur dasarnya semata-mata mempertimbangkan masa depan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi dari jawaban sangat setuju dan setuju yang mencapai 93,3%. Dalam hal ini wartawan peliput berita kriminal dan hukum di Makassar memberikan penilaian bahwa menyebut dan menyiarkan identitas tersebut akan mengancam nama baik dan masa depan dari korban dan pelaku kejahatan oleh anak di bawah umur. Wartawan menilai bila menyebut dan menyiarkan identitas tersebut merupakan sesuatu yang salah, karena berbenturan dengan Pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia).

Selanjutnya pernyataan kelima, mayoritas wartawan peliput berita kriminal dan hukum di Makassar tidak sepakat bila seorang wartawan berhak menyebut dan menyiarkan identitas korban asusila dan anak di bawah umur yang tersangkut kasus kriminal. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi presentase dari jawaban sangat tidak setuju dan tidak setuju yang mencapai 73,3%. Selanjutnya pernyataan keenam, mayoritas wartawan peliput berita kriminal dan hukum di Makassar menyatakan sepakat bahwa wartawan berkewajiban melindungi identitas korban maupun anak di bawah umur yang tersangkut kasus kriminal. Hal ini bisa dilihat dari akumulasi

presentase dari jawaban sangat setuju dan setuju yang mencapai 96,7%. Hal ini berarti sesuai dengan apa yang diamanatkan Pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia), yang bertujuan melindungi identitas tersebut. Sedangkan sisanya yang merupakan minoritas yang menyatakan tidak sepakat dengan presentase yang sangat kecil yakni 3,3%.

Selanjutnya pernyataan ketujuh, mayoritas wartawan peliput berita kriminal dan hukum di Makassar tidak merasa tersiksa oleh Pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia). Hal ini bisa dilihat dari akumulasi presentase dari jawaban sangat tidak setuju dan tidak setuju yang mencapai 90%. Selanjutnya pernyataan Kedelapan seluruh wartawan kriminal dan hukum di Makassar meyakini bahwa Pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia) merupakan rambu-rambu yang tepat dalam mengatur tugas jurnalistiknya. Hal ini bisa dilihat dari akumulasi presentase jawaban sangat setuju dan setuju yakni 100%.

Menurut persepsi mereka Pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia) dipercaya merupakan rambu-rambu yang tepat dalam mengatur. Wartawan peliput berita kriminal dan hukum di Makassar percaya bahwa Pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia) tidak membuat mereka tersiksa karena dipercaya sesuai dengan porsinya.

Hohler dalam bukunya Rakhmat mengatakan, kepercayaan tidak ada hubungannya dengan hal-hal gaib, tetapi hanyalah keyakinan bahwa sesuatu itu benar atau salah atas dasar bukti, sugesti otoritas, pengalaman, atau intuisi. Kepercayaan

memberikan perspektif pada manusia dalam mempersepsikan kenyataan, memberikan dasar bagi pengambilan keputusan dan menentukan sikap terhadap objek sikap.⁷⁰

Selanjutnya pernyataan kesembilan, seluruh wartawan peliput berita kriminal dan hukum di Makassar percaya bahwa wartawan yang mengabaikan kode etik jurnalistik akan menghancurkan kredibilitas dan citra pers secara umum di mata publik. Hal ini dapat dilihat dari akumulasi presentase jawaban dari sangat setuju dan setuju yang mencapai 100%. Mereka yakin pelanggaran yang dilakukan yang mengabaikan kode etik jurnalistik akan menghancurkan kredibilitas seorang wartawan maupun media tempat ia bekerja.

Bila indikator sikap dikaitkan dengan teori disonansi kognitif, dalam rangkaian sub variabel ini terdapat faktor-faktor yang dalam disonansi kognitif, yakni faktor-faktor yang dapat membentuk sikap. Salah satunya adalah *membership group*. Berubahnya *membership group* akan dapat pula mengubah sikap seseorang. Individu yang tergabung dalam berbagai-bagai macam kelompok yang ada dalam masyarakat, baik karena kepentingan bersama atau tujuan bersama, maupun karena alasan-alasan lain. Dalam hal ini, ketika seorang memasuki dunia jurnalistik, tentunya akan berhadapan dengan aturan yang mengatur wartawan, yang tertuang dalam Kode Etik Jurnalistik. Maka dengan tergabungnya seseorang tersebut menjadi wartawan, otomatis harus pula beradaptasi dan mematuhi amanat kode etik yang telah ada.

⁷⁰ Jalaludin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi Suatu Pengantar* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004), h. 42 dan 43

Teori disonansi merumuskan bahwa ketika seseorang ditempatkan pada sebuah situasi dimana harus dia berperilaku di depan umum yang bertentangan dengan sikap pribadinya, maka dia mengalami disonansi dari pengetahuan tentang faktanya.⁷¹

Apabila seseorang menunjukkan tindakan di depan umum yang tidak konsisten dengan sikapnya sendiri, diprediksikan akan terjadi disonansi.⁷²

3. Perilaku wartawan kriminal dan hukum di Makassar terhadap Pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia)

Setelah melalui proses pembentukan sikap, kemudian timbul perilaku yang berbeda-beda dari persepsi para wartawan. Dari hasil kusioner yang diolah dari indikator perilaku, mayoritas pendapat wartawan peliput berita kriminal dan hukum di Makassar tidak setuju atau tidak sepakat jika untuk menarik minat masyarakat menonton berita dan membaca Koran, wartawan harus menyebut dan menyiarkan identitas korban asusila dan pelaku kejahatan anak di bawah umur. Hal ini ditunjukkan hasil akumulasi jawaban dari sangat tidak setuju dan tidak setuju yang mencapai 90%. Sisanya yang sepakat hanya 10% saja. Tingginya presentase mayoritas ini sesuai dengan amanat pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia) yang bertujuan melindungi identitas tersebut.

⁷¹ Warner J, severin dan James W Tankard, Jr. *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode dan Terapan di dalam Media Massa* (Cet. Ke-5. Jakarta: Kencana. 2009), h. 166

⁷² Warner J, severin dan James W Tankard, Jr. *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode dan Terapan di dalam Media Massa*. h. 166

Selanjutnya pernyataan yang berkaitan dengan tujuan. Mayoritas wartawan peliput berita kriminal dan hukum di Makassar menyatakan tidak setuju atau tidak sepakat agar mendapatkan efek jera, wartawan harus menyebut dan menyiarkan identitas korban maupun pelaku kejahatan oleh anak di bawah umur. Hal ini ditunjukkan dengan akumulasi jawaban sangat tidak setuju dan tidak setuju dari responden yang mencapai 70%. Wartawan meskipun ingin pelaku kejahatan mendapat efek jera dari perbuatannya namun, tujuan tersebut bertentangan dengan Pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia) yang tujuan utamanya melindungi identitas tersebut.

Selanjutnya masih dengan pernyataan yang berkaitan dengan tujuan. Mayoritas wartawan peliput berita kriminal dan hukum di Makassar menyatakan tidak setuju jika menggunakan kebebasan pers untuk motif dan tujuan pribadi. Hal ini ditunjukkan dari tingginya presentase dari responden yang sangat tidak setuju dan tidak setuju yang mencapai 90%. Meskipun wartawan mempunyai kebebasan kemerdekaan menulis berita di media massa namun, tetap harus menggunakan kebebasannya untuk melindungi dan menyembunyikan identitas korban dan pelaku kejahatan oleh anak di bawah umur. Sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia).

Di dalam ruang kerja seorang jurnalis/wartawan terdapat banyak kepentingan yang melingkupinya. Entah itu pemilik modal, pemerintah, narasumber, pemasang iklan dan lain-lainnya.

“Seorang wartawan memang menaati kode etik. Namun dilain hal ada yang lebih berkuasa selain wartawan, entah itu seorang redaktur/produser ataupun yang mempunyai pengaruh di dalam media itu sendiri”.⁷³

Melihat hasil di atas, hubungan antara Pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia) sebagai yang mengatur dengan perilaku wartawan peliput berita kriminal dan hukum di Makassar adalah sejalan atau relevan. Dalam teori disonansi kognitif hal ini disebut sebagai hubungan yang konsonan. Dimana antara dua elemen berada dalam posisi yang seimbang satu sama lain atau hubungan tersebut adalah relevan, yakni antara Pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia) dengan wartawan peliput berita kriminal dan hukum di Makassar seimbang. Artinya apa yang diamanatkan Pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia) sesuai dengan perilaku wartawan terhadap Pasal 5 dengan menganggap pula sebagai landasan yang tepat dalam mengatur wartawan.

Wartawan/jurnalis masih menjaga kode etik yang di amanatkan oleh Undang-undang Pers No. 40 Tahun 1999. Menurut Ibnu Munsir, ketika dia melakukan tugas jurnalistiknya. Dia masih menjalankan aturan yang diamanatkan kode etik maupun produser yang memegang kendali atas berita tersebut.

“Penyamaran ataupun pembluran identitas itu lebih baik. karena disini kita masih memberikan harapan untuk si korban maupun si pelaku kejahatan oleh anak di bawah untuk bisa hidup normal seperti biasanya. Masa depan mereka adalah alasan kenapa identitas itu disamarkan. Selain itu juga kode etik jurnalistik sudah menjadi bagian dari diri seorang wartawan. Karena sudah ditanamkan di dalam sanubari seorang wartawan”.⁷⁴

⁷³ Qorih. Indira (23 tahun), wartawan Harian rakyat Sulsel, *Wawancara Via SMS*, Makassar , 6 September 2014.

⁷⁴ Ibnu Munsir (22 Tahun), Wartawan Trans TV Biro Makassar, *Wawancara*, Makassar, 8 September 2014.

Selanjutnya pernyataan dari Redaktur Trans TV biro Makassar yang terbiasa mengedit berita maupun naskah berita yang akan dikirim ke redaksi Trans TV di Jakarta :

“Menyebut nama sama sekali tidak boleh. Kita hanya memakai inisial atau nama samaran, pembluran, juga wajahnya ditutupi dengan kain atau sabagainya. Sedangkan pengambilan gambar dilarang mengambil gambar secara frontal dengan kata lain gambar tidak boleh diambil secara jelas. Gambar diambil harus dari belakang, samping dan tidakizinkan diambil dari depan dengan sangat jelas. Karena Kenapa, anak-anak ini masih kecil, kejiwaan mereka belum stabil. Kasus ini juga sangat melanggar etikaewartawanan. Wartawan mempunyai landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Selanjutnya, ketika ada wartawan yang melanggar kode etik tersebut biasanya saya langsung menegur mereka”.⁷⁵

Wartawan dengan sikap, pemikiran dan keyakinan yang dia miliki yang dalam hal ini adalah kode etik jurnalistik, sesuai dengan perilaku yang ia terapkan, atau dengan kata lain mengalami hubungan yang konsonan dalam mempersepsikan kode etik jurnalistik Pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia). Hal ini diketahui dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan.

Festinger memberikan penjelasan bahwa hubungan konsonan adalah di mana ada antara dua elemen, ketika elemen tersebut ada pada posisi seimbang satu sama lain (yakni antara pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia) dengan perilaku wartawan tentang penerapan Pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia).⁷⁶

⁷⁵ Ahmad K. Syamsudin (32 Tahun), Redaktur Trans TV Biro Makassar, *Wawancara*, Makassar 11 September 2014.

⁷⁶ ⁷⁶ Richard West, Lynn H. Turner, *Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi* (Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2008), h. 137

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis data pada ketiga kategori yakni, pengetahuan, sikap dan perilaku. Peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Pada tahap pengetahuan yang telah melalui proses penginderaan, dapat disimpulkan wartawan peliput berita kriminal dan hukum di Makassar memiliki pengetahuan yang tinggi terhadap Pasal 5 KEWI. Hal ini ditunjukkan oleh 82,2% responden yang berpengetahuan tinggi terhadap Pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia) yang mengatur dalam tugas jurnalistik dan pengertian identitas yang terdapat di dalam Pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia).

Pada tahap sikap wartawan dapat disimpulkan wartawan peliput berita kriminal dan hukum di Makassar (80,4%) memiliki sikap yang setuju dan sepakat terhadap pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia) seperti dalam penulisan berita dan peliputan berita. Mayoritas wartawan peliput berita kriminal dan hukum di Makassar juga memberikan perhatian tinggi kepada korban asusila, pelaku di bawah umur maupun keluarga yang bersangkutan dengan melindungi identitasnya agar tidak dipublikasikan. Selain itu wartawan peliput berita kriminal dan hukum di Makassar juga memberikan perhatian terhadap pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia) sebagai kode etik yang tepat dalam mengatur wartawan dalam tugas jurnalistiknya.

Pada tahap perilaku wartawan, dapat disimpulkan bahwa wartawan peliput berita kriminal dan hukum di Makassar memiliki perilaku yang relevan antara pasal 5

dengan perilaku wartawan peliput berita kriminal dan hukum di Makassar. hal ini ditunjukkan oleh 77,7% (seluruh pemberitaan mereka menyamakan korban, pelaku maupun orang-orang bersangkutan dengan kasus tersebut). Artinya apa yang di amanatkan oleh pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia) sesuai dengan perilaku yang ditunjukan oleh wartawan sendiri. yakni tidak menyebut dan menyiarkan korban asusila dan pelaku kejahatan oleh anak di bawah umur.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut:

1. Dewan pers sebagai lembaga pengawas agar memaksimalkan fungsi kontrolnya dan lebih aktif lagi mengawasi produk jurnalistik dari media massa. khususnya penegakkan Pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia).
2. Untuk wartawan/jurnalis lebih banyaklah mengikuti seminar atau pertemuan yang membahas tentang Kode etik jurnalistik. Agar dapat memaksimalkan pengetahuan tentang Kode Etik. Khususnya Pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia).
3. Untuk para wartawan Indonesia, agar menerapkan Pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia) dengan memperhatikan dan mempertimbangkan pasal tersebut dalam proses peliputan maupun dalam penulisan berita.

Daftar Outline

- Cangara, Hafied DKK. 2006. *Dasar-dasar Jurnalistik*. Makassar: Alauddin press
- Effendi, Onong Uchjana. 2007. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ishwara, Luwi. 2011. *Jurnalisme Dasar*. Jakarta: Kompas Media Nusantara..
- Krisyantono, Rachmat. 2008. *Tekhnik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta : Kencana.
- L. Solso. Robert. 2008. *Psikologi Kognitif*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Ma'rat. 1981. *Sifat Manusia, Perubahannya, dan Pengukurannya*. Jakarta: Ghakia Indonesi
- Mulyana, Deddy. 2005. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurudin. 2011. *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rakhmat, Jalaludin. 2004. *Psikologi Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Romli, Asep Syamsul M. 2002. *Jurnalistik Terapan*. Bandung: Batic Press.
- Santana, Septiawan. 2005. *Jurnalisme Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Santoso, Singgih. 2007. *Menguasai Statistik dengan SPSS 15*. Jakarta: Alex Media Kompuntido.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2006. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Singarimbun, Masri dan Soffian Effendi. 2006. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Sugyono. 2008. *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* : Bandung : Alfabeta.
- Suhandang, Kustadi. 2004. *Pengantar Jurnalistik*. Bandung : Nuansa.
- Sukardi, Wina Armada. 2007. *Close Up Seperempat Abad Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik*. Jakarta: Dewan Pers
- Tamburaka, Apriadi. 2013. *Literasi Media Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Walgito, Bimo. 1989. *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*. Yogyakarta: Yayasan Fakultas Psikologi UGM.

West, Richard dan Lyyn H. Turner. 2008. *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.

Sumber lain :

- **Tribun Timur Makassar**
- **Harian Rakyat Sulsesl**
- **www. Tribun Timur.com**
- **www. Berita Kota Makassar.com**
- **[www.Fajar](#) online. Com**





LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Skor likert hasil penelitian.

no. res	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
1.	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4	2	1	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3	2	4		
2.	4	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	2	3	4	3	3	4	4	3	4	3	4	3	3	4			
3.	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3		
4.	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	2	2	2	2	3	3		
5.		3	3	3	3	3	4	3	1	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	2		
6.	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3		
7.	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2	3	3	3		
8.	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	1	4	4	3
9.	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	3	4	3	4	3	2	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	3	4	
10	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	2	3	3	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
11.	3	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3	4	2	
12.	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	2	4	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	
13.	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	
14.	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	2	3	4	4	2	3	3	4	3	3	3	4	2	3	3	3	4		
15.	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2	3	3	3	
16.	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	2	3	3	4	3	4	4	4	1	4	3	4		
17.	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	
18.	3	3	3	4	3	3	4	4	2	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2	4	4	3		
19.	3	4	1	3	3	3	4	3	4	4	4	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	
20.	3	3	3	3	4	3	3	4	2	4	3	3	4	4	4	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	1	3	3	3	
21.	3	4	4	2	4	4	3	3	2	4	4	4	3	3	4	2	3	4	1	4	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4		
22.	3	3	2	3	3	4	3	4	3	4	3	2	2	4	4	3	3	2	3	4	3	2	3	4	4	3	4	3	4	4		
23.	4	3	4	2	3	2	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	3	4	
24.	3	4	3	3	4	1	4	2	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3	3	2	1	3	4	3			
25.	3	3	3	2	4	4	4	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	2	3	3	3	3	4		
26.	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	1	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4		
27.	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	2	3	4	4			
28.	3	4	3	3	4	1	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	1	3	4	4		
29.	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4		
30.	3	3	3	2	3	1	2	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	3	2	4	3			

Ket : pertanyaan yang berwarna adalah pertanyaan yang dihilangkan karena tidak valid atau kurang reliabel.

UJI REALIBILITAS

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	8.0
	Excluded ^a	0	0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.706	29

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
p1	178.8667	160.051	.455	.697
p2	178.7000	159.390	.479	.696
p3	178.8333	157.730	.400	.694
p4	179.1333	157.430	.370	.694
p5	178.5333	159.016	.466	.695
p6	178.9000	157.334	.321	.695
p7	178.5667	156.461	.595	.690
p8	178.7667	157.564	.515	.693
p9	179.0333	161.206	.193	.702
p10	178.6000	159.421	.443	.696
p11	178.8000	158.648	.368	.696

p12	178.8000	157.959	.410	.694
p13	179.0667	152.340	.634	.683
p14	178.9667	163.275	.064	.707
p15	178.8333	160.489	.389	.698
p16	178.9333	161.926	.178	.702
p17	178.9333	161.444	.315	.700
p18	178.9000	160.093	.311	.698
p19	179.0667	168.064	-.184	.715
p20	178.7667	160.047	.460	.697
p21	178.6333	158.171	.554	.693
p22	178.6333	163.068	.101	.705
p23	178.8333	161.661	.357	.700
p24	178.9000	156.714	.600	.691
p25	179.0000	164.552	.017	.708
p26	179.7333	166.616	-.096	.713
p27	178.8667	157.154	.542	.692
p28	178.7667	161.771	.251	.701
p29	178.6333	158.378	.381	.695

Nilai Cronbach's alpha semakin mendekati 1, maka realibitas semakin tinggi.

Dapat disimpulkan bahwa realibilitas skala 0,706 dikatakan tinggi.

KODE ETIK JURNALISTIK (KEJ)

Kemerdekaan berekspresi, berpendapat dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers tersebut, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut untuk profesional dan terbuka untuk dikontrol masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran :

- a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.

- b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
- d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran:

Cara-cara yang profesional adalah:

- a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
- b. menghormati hak privasi;
- c. tidak menyuap;
- d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
- e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
- f. menghormati pengalaman traumatis narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
- g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
- h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran

- a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.

- b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
- c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
- d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran:

- a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
- d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
- e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran:

- a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran:

- a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
- b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran:

- a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
- b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
- c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
- d. “Off the record” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran:

- a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
- b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran:

- a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
- b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran:

- a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
- b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran:

- a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
- b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
- c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Deskripsi Statistik dan Grafik Hasil Penelitian

1. pengetahuan

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
1. apakah anda mengetahui tentang Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia	30	1.00	24.00	20.0667	8.02983
Valid N (listwise)	30				

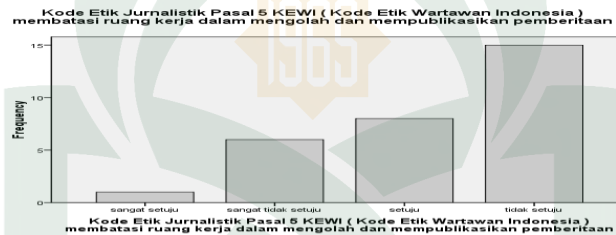


	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
2. Dalam tugas jurnalistik wartawan menerapkan Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia	30	9.00	21.00	17.4000	5.59310
Valid N (listwise)	30				



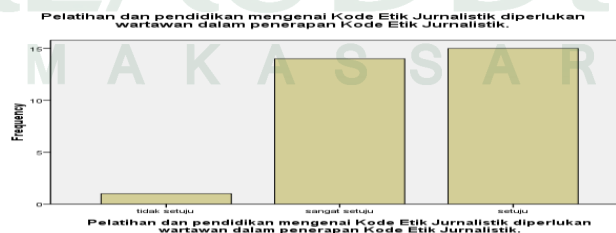
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
3. Menurut anda apakah identitas anak adalah yang menyangkut diri seseorang memudahkan orang lain melacak nama, tempat dan keluarga yang bersangkutan	30	1.00	18.00	13.6667	5.77350
Valid N (listwise)	30				



Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
4. Pelatihan dan pendidikan mengenai Kode Etik Jurnalistik diperlukan wartawan dalam penerapan Kode Etik Jurnalistik.	30	1.00	15.00	14.0667	2.51798
Valid N (listwise)	30				



Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
5. Sebagai pedoman dan tuntutan profesi, Kode Etik Jurnalistik tidak hanya sebagai nilai yang ideal saja tetapi, harus terkait langsung praktek jurnalistik	30	12.00	18.00	15.6000	2.98964
Valid N (listwise)	30				



2. Sikap

Descriptive Statistics

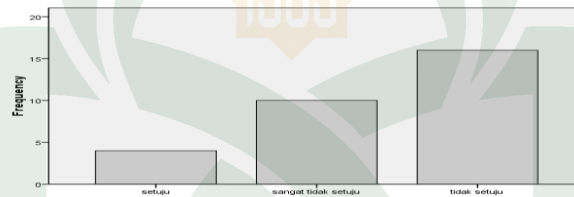
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
6. meliput dan menulis berita asusila harus sesuai dengan kode etik jurnalistik pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia)	30	1.00	19.00	14.8100	5.90326
Valid N (listwise)	30				



Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
7. Setujukah anda kebijakan redaksi mengharuskan menyebut dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan pelaku kejahatan anak di bawah umur	30	4.00	16.00	12.4000	4.34384
Valid N (listwise)	30				

kebijakan redaksi mengharuskan menyebut dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan pelaku kejahatan anak di bawah umur

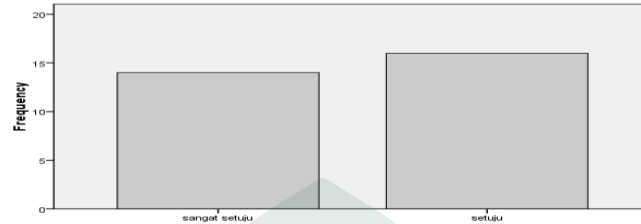


kebijakan redaksi mengharuskan menyebut dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan pelaku kejahatan anak di bawah umur

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
8. Menurut anda wartawan sebagai komunikator memiliki fungsi informasi, namun harus mempertimbangkan nama baik dari korban asusila dan pelaku kejahatan asusila oleh anak di bawah umur	30	14.00	16.00	15.0667	1.01483
Valid N (listwise)	30				

wartawan sebagai komunikator memiliki fungsi informasi, namun harus mempertimbangkan nama baik dari korban asusila dan pelaku kejahatan asusila oleh anak di bawah umur

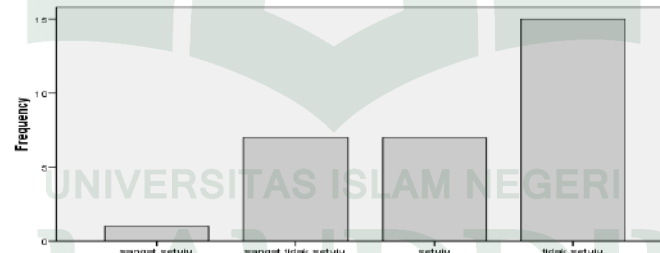


wartawan sebagai komunikator memiliki fungsi informasi, namun harus mempertimbangkan nama baik dari korban asusila dan pelaku kejahatan asusila oleh anak di bawah umur

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
9. Apakah wartawan punya hak untuk menyebutkan dan menyiarkan korban kejahatan asusila dan pelaku kejahatan anak di bawah umur	30	1.00	15.00	10.8233	4.38467
Valid N (listwise)	30				

wartawan punya hak untuk menyebutkan dan menyiarkan korban kejahatan asusila dan pelaku kejahatan anak di bawah umur



wartawan punya hak untuk menyebutkan dan menyiarkan korban kejahatan asusila dan pelaku kejahatan anak di bawah umur

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
10. Menurut anda wartawan wajib menyembunyikan dan melindungi identitas korban kejahatan asusila dan pelaku kejahatan asusila oleh anak di bawah umur	30	1.00	23.00	18.8667	7.66872

Descriptive Statistics

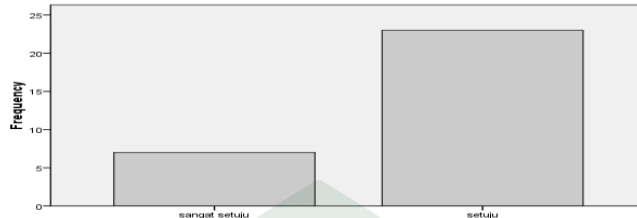
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
10. Menurut anda wartawan wajib menyembunyikan dan melindungi identitas korban kejahatan asusila dan pelaku kejahatan asusila oleh anak di bawah umur	30	1.00	23.00	18.8667	7.66872
Valid N (listwise)	30				



Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
11. Menurut anda apakah pasal 5 KEWI (Kode etik Wartawan Indonesia) merupakan rambu-rambu yang tepat untuk mengatur jalan kerja wartawan ketika meliput dan menulis berita kasus asusila	30	7.00	23.00	19.2667	6.88293
Valid N (listwise)	30				

pasal 5 KEWI (Kode etik Wartawan Indonesia) merupakan rambu-rambu yang tepat untuk mengatur jalan kerja wartawan ketika meliput dan menulis berita kasus asusila

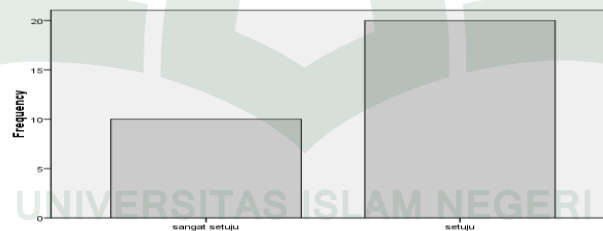


pasal 5 KEWI (Kode etik Wartawan Indonesia) merupakan rambu-rambu yang tepat untuk mengatur jalan kerja wartawan ketika meliput dan menulis berita kasus asusila

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
12. Setujukah anda wartawan yang mengabaikan kode etik jurnalistik akan menghancurkan kredibilitas dan citra pers secara umum di mata actual	30	10.00	20.00	16.6667	4.79463
Valid N (listwise)	30				

wartawan yang mengabaikan kode etik jurnalistik akan menghancurkan kredibilitas dan citra pers secara umum di mata actual



wartawan yang mengabaikan kode etik jurnalistik akan menghancurkan kredibilitas dan citra pers secara umum di mata actual

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
13. Larangan penyebutan nama dan identitas korban kejahatan asusila dan pelaku kejahatan oleh anak di bawah umur dasarnya semata-mata mempertimbangkan masa depan	30	2.00	19.00	15.7667	4.93183

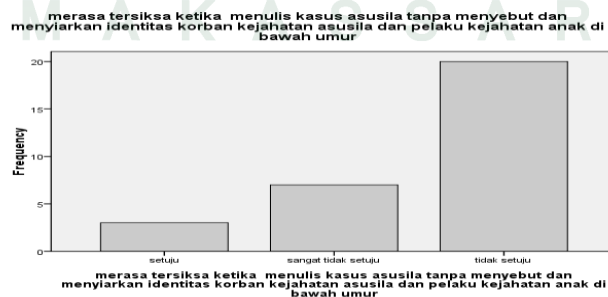
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
13. Larangan penyebutan nama dan identitas korban kejahatan asusila dan pelaku kejahatan oleh anak di bawah umur dasarnya semata-mata mempertimbangkan masa depan	30	2.00	19.00	15.7667	4.93183
Valid N (listwise)	30				



Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
14. merasa tersiksa ketika menulis kasus asusila tanpa menyebut dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan pelaku kejahatan anak di bawah umur	30	3.00	20.00	15.2667	6.89294
Valid N (listwise)	30				



3. perilaku

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
15. untuk menarik minat masyarakat untuk menonton berita atau membaca koran anda, anda harus menyebut dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan pelaku kejahatan oleh anak di bawah umur	30	3.00	21.00	16.2000	7.49897
Valid N (listwise)	30				



Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
16. Wartawan harus menyebut dan menyiarkan identitas pelaku kejahatan oleh anak di bawah umur agar mendapatkan efek jera.	30	1.00	15.00	10.8667	4.40010

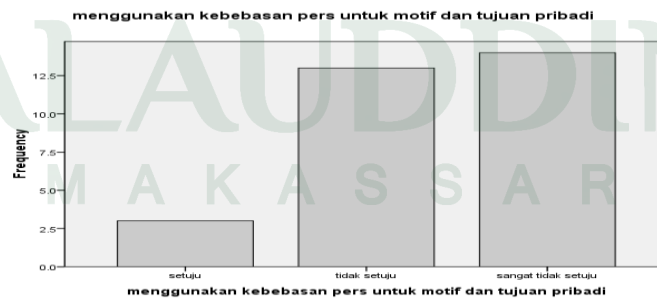
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
16. Wartawan harus menyebut dan menyiarkan identitas pelaku kejahatan oleh anak di bawah umur agar mendapatkan efek jera.	30	1.00	15.00	10.8667	4.40010
Valid N (listwise)	30				



Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
17. menggunakan kebebasan pers untuk motif dan tujuan pribadi	30	3.00	14.00	12.4667	3.24551
Valid N (listwise)	30				





Nama : Yulianti Sa'ban Adam
Nim : 50500110027
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat tanggal lahir : 19 Juli 1991
Agama : Islam
Alamat : Jln. Manuruki Raya No. 14
Alamat Email : yuyunyulianti14@yahoo.com

Riwayat pendidikan :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Madrasah Ibtidaiyyah | Tahun 1997-2003 |
| 2. SMP negeri 1 Woja Dompu | Tahun 2003-2006 |
| 3. SMA negeri 2 Woja Dompu | Tahun 2006-2009 |
| 4. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar | Tahun 2010-2014 |